

***MEDIA RELATIONS HUMAS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM PENYELENGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2016***



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**AHMAD RIDHA AKHZANNUR
NIM. 50700113013**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ridha Akhzannur
NIM : 507001130013
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 26 Maret 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jl. Nipa-Nipa I Blok III No.17 Antang.
Judul : *MEDIA RELATIONS* HUMAS KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN
2016

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 27 November 2017
Penyusun,



Ahmad Ridha Akhzannur
NIM: 50700113013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Media Relations* Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016," yang disusun oleh Ahmad Ridha Akhzannur, NIM: 50700113013, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1439, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

Samata-Gowa, 27 November 2017 M.
8 Rabiul Awal 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., Ph. D	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kamaluddin Tajibu, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dra. St. Nasriah, M. Sos.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Misbahuddin, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Mudzhirah Nur Amrullah, S.Sos., M.Si	(.....)



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar.

Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.

NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“MEDIA RELATIONS HUMAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2016”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan tantangan karena keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan ilmiah, waktu, biaya, dan tenaga. Tetapi komitmen yang kuat serta adanya petunjuk dan saran dari berbagai pihak, semua rintangan dan tantangan itu dapat diminimalkan dengan ucapan Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu baik moril maupun material. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segala jasa sumbangsih yang telah diberikan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Ag selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. H. Lomba Sultan, M.A selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, Ph.D selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Hamdan Johannes, Ph.D selaku Wakil Rektor IV.

2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Bapak Dr. H. Misbahuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Mahmuddin M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibunda Dr. Nursyamsiah M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
3. Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si dan Haidir Fitra Siagian, M.Si., Ph.D selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Komunikasi beserta Staf atas segala perhatiannya kepada penulis.
4. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag dan Mudzhirah Nur Amrullah, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas waktu dan keikhlasannya membimbing penulisan selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Kamaluddin Tajibu, M.Si dan Dra. St. Nasriah, M.Sos.I selaku penguji/ munaqisy I dan II atas waktu dan keikhlasannya menguji penulisan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Staf yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis, dan meminjam buku-buku yang ada di Perpustakaan.
7. Seluruh dosen di Fakultas dan Komunikasi tanpa terkecuali terima kasih atas ilmunya.
8. Semua rekan Ilmu Komunikasi Kelas A 2013 yang telah berpartisipasi membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua teman-teman KKN Desa Padaelo, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang telah bersama-sama dalam menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, dan telah memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua informan yang memberikan waktu dan informasinya kepada penulis
11. Buat Bapak Drs. Ardiansyah Sanusi, Ibu Dra. Hj. Sariwati yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, penulis hanya berdoa, semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat pahala disisi Allah SWT. dan segala rendah hati penulis memohon maaf, sekaligus akan berusaha untuk memperbaiki jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik secara substansi maupun secara metodologis.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 November 2017
Penulis,

AHMAD RIDHA AKHZANNUR
NIM: 50700113013

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Hubungan Masyarakat	14
B. Teori Media Relations	20
C. Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pandangan Islam.....	29
D. Karangka Konseptual	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38

E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan Media Lokal terkait Publikasi Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016	50
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Media Realations Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam Publikasi Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji ...	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi Penelitian.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90



DAFTAR TABEL

1.1 Pendaftar (<i>waiting list</i>) Haji dan Berangkat Haji	4
1.2 Perbedaan Penelitian	12
3.1 Daftar Informan.....	39



DAFTAR GAMBAR

2.1 Arus Komunikasi Media Relations	21
2.2 Model Hubungan <i>Public Relations</i> dengan Media Massa (<i>Press Agency</i>).....	25
2.3 Model Hubungan <i>Public Relations</i> dengan Media Massa (<i>Public Information</i>)..	26
2.4 Model Hubungan <i>Public Relations</i> dengan Media Massa (<i>Two-way Asymmetric</i>)	27
2.5 Model Hubungan <i>Public Relations</i> dengan Media Massa (<i>Two-way Symmetric</i>)	29
2.6 Proses Pendaftaran Ibadah Haji	32
2.7 Karangka Konseptual	36
4.1 Struktur Organisasi Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag Sulsel.....	46
4.2 Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel.....	47
4.3 <i>Website</i> Kanwil Kemenag Sulsel	55
4.4 Siskohat dalam <i>Website</i> Kementerian Agama RI	56
4.5 Alur Siskohat Generasi Kedua (Gen 2).....	59

TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

b : ب	z : ز	f : ف
t : ت	s : س	q : ق
s\ : ث	sy : ش	k : ك
j : ج	s} : ص	l : ل
h} : ح	d} : ض	m : م
kh : خ	t} : ط	n : ن
d : د	z} : ظ	w : و
z\ : ذ	‘ : ع	h : هـ
r : ر	g : غ	y : ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal dan diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

VOKAL	PENDEK	PANJANG
<i>Fath}ah</i>	A	a>
<i>Kasrah</i>	I	i>
<i>D}amah</i>	U	u>

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan (u) misalnya kata :

Baina (بين) dan *qaul* (قول)

3. *Tasdi>d* dilambangkan dengan konsonan ganda

4. Kata sandang *al-* (*alif la>m ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*al-*).

Contohnya :

Menurut al-Bukha>ri>, hadis ini....

Al-Bukha>ri> berpendapat bahwa hadis ini....

5. *Ta> Marbuta>t}ah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. tetapi jika terletak di akhir kalimat, ditransliterasi dengan huruf “h”. Contohnya :

Al-risa>lat li al-mudarrisah الرسالة للمدرسة

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari pebendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *sunnah*, khusus dan umum, kecuali bila istilah itu menjadi bagian yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n (في ظلال القرآن)

Al-Sunnah qabl al-Tadwi>n (السنة قبل التدوين)

Inna al- 'Ibrah bi 'Umu>m al-Lafz} la> bi Khus}u>s} al-Sabab

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

7. *Lafz} al-Jala>lah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{a>f ilaihi* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contohnya :

دين الله = *di>nullah* بالله = *billa>h*

هم في رحمة الله = *hum fi> rah}matilla>h*

8. Lafal yang diakhiri dengan *ya'nisbah*, maka akan ditulis dengan “i”.

Contohnya :

الشاطبي = *al-Sya>t}ibi>*

القرافي = *al-Qara>fi>*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. swt. | = <i>Subh}a>na wa ta'a>la</i> |
| 2. saw. | = <i>S{allalla>h 'alaihi wa sallam</i> |
| 3. a.s. | = <i>'Alaih al-sala>m</i> |
| 4. H | = Hijriyah |
| 5. M | = Masehi |
| 6. w. | = wafat |
| 7. QS. .../.....: 4 | = Qur'an Surah .../ no. surah: ayat 4. |

ABSTRAK

NAMA : Ahmad Ridha Akhzannur

Nim : 50700113013

**Judul : “*MEDIA RELATIONS* HUMAS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2016”**

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal terkait publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016 2) Apa faktor pendukung dan penghambat relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal dalam publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data peneliti berasal dari kumpulan arsip Kanwil Kemenag Sulsel. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Adapun analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Humas Kanwil Kemenag Sulsel berperan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji dan secara *eksternal* membangun relasi dengan media massa (cetak, elektronik, *online*), kemudian model komunikasi yang terjadi dalam konteks *media realtions* antara Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media massa lokal, mencakup tiga aspek yaitu, *Public Information*, *Two-way Asymmetric* dan *Two-way Symmetric*. Adapun yang menjadi faktor pendukung yakni keberadaan media internal Kementerian Agama seperti majalah dan *website*, dalam hal ini *website* Kementerian Agama RI. terintegrasi dengan seluruh *website* Kanwil Kemenag di setiap provinsi, faktor pendukung lainnya yakni dapat menjalin relasi terbuka dengan media. Sementara faktor penghambat yakni Humas Kanwil Kemenag Sulsel tidak hanya memfasilitasi unit kerjanya melainkan juga turut memfasilitasi Humas Kemenag Kabupaten/Kota, faktor penghambat lainnya persoalan anggaran, dimana biaya periklanan di media massa membutuhkan biaya yang relatif besar, selain itu penghambat juga dilihat dalam perspektif relasi dengan publik, dimana media internal majalah dan *website* yang dimiliki Humas Kanwil Kemenag Sulsel dianggap kurang dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh pelosok daerah terutama yang hendak mengakses informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kewajiban tersebut ditujukan bagi umat Islam yang mampu secara materi, fisik dan mental. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Salah satu bentuk peran dan tanggung jawab pemerintah adalah publikasi informasi tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Lembaga pemerintah yang berwenang mengelola informasi Haji, adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI beserta jajaran strukturalnya di seluruh daerah. Secara normatif, hal ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan perihal kewajiban lembaga negara untuk mempublikasikan informasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa; Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses (Pasal 23 ayat 5).

Demikian halnya dalam uraian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 23 ayat 1).

Ketentuan normatif tersebut menegaskan bahwa informasi publik, terutama informasi Haji, wajib disebarluaskan kepada masyarakat dimana Kementerian Agama RI memiliki fungsi dan peran sebagai badan publik atau penyelenggara pelayanan publik sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 13 Tahun 2012, melakukan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Haji dan umrah; dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi (PMA 13/2012: Pasal 5 huruf b dan e). Jika mencermati struktur organisasi Kementerian Agama di tingkat daerah, khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian ini, maka pengelolaan informasi Haji merupakan tugas pokok dan fungsi Bidang Tata Usaha yang menaungi Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (PMA 13/2012: Pasal 815 huruf a dan Pasal 818 huruf d).

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka jelas bahwa lembaga ini memiliki fungsi dan peran kehumasan, dimana Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) berkordinasi dengan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Seksi Sistem Informasi Haji) dalam rangka pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah. Namun demikian, Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami hambatan dalam proses publikasi informasi Haji, apabila tidak bersinergi atau bekerjasama dengan pers-media massa yang memang konsen di bidang penerbitan atau penyiaran informasi.

Dalam perspektif teori *media relations*, dijelaskan bahwa praktisi Humas harus menciptakan hubungan media yang baik, mengadakan perubahan dan perbaikan agar

hubungan dengan media yang selama ini tercipta terus terjaga dengan baik. F.Jefkins (2002:10) menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hubungan dengan pers bisa terbina secara baik, yaitu

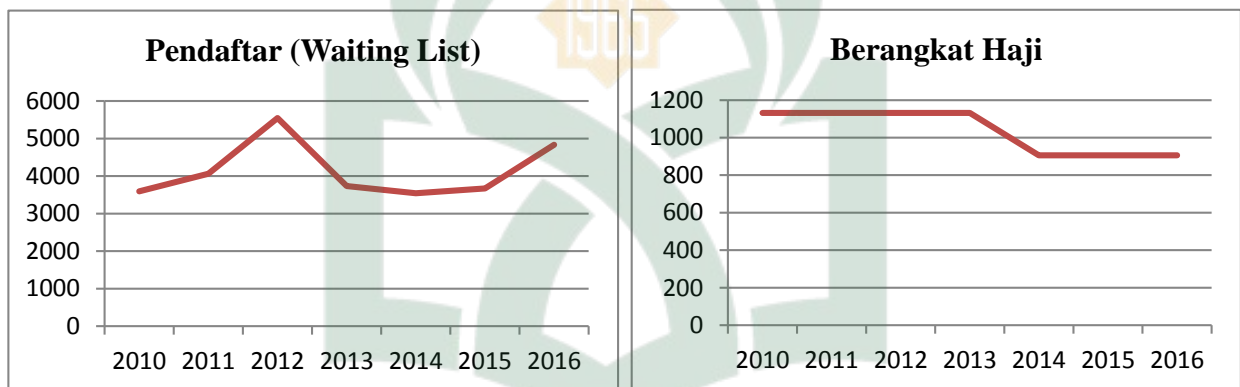
Servicing the media (memahami dan melayani media), *Estabilishing a reputations for reliability* (membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya), *Supplying good copy* (menyediakan salinan yang baik), *Cooperation in providing material* (bekerja sama dalam penyajian materi), dan *Building personal relationship with the media* (membangun hubungan personal yang kokoh).

Pendapat F.Jefkins tersebut menegaskan bahwa jika organisasi atau lembaga pemerintah dapat menjalankan hubungan yang baik dengan media, maka akan berdampak baik pula pada Humas dan pemerintahan tersebut. Namun berdasarkan hasil pengamatan awal, menunjukkan bahwa Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, lebih cenderung mempublikasikan informasi Haji melalui media internal yang dimilikinya. Salah satu media internal yang dimaksud adalah *website* dan majalah, akan tetapi konten berita dan informasi yang dipublikasi sangat beragam menyangkut kinerja seluruh jajaran Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan di daerah.

Pada kenyataannya, informasi yang spesifik tentang penyelenggaraan ibadah Haji justru terpusat (*centralized*) atau dikelola dengan satu pintu oleh Kemenag RI melalui *website* kemenag.go.id yang di dalamnya terdapat konten “publikasi” meliputi artikel, berita, media center Haji (majalah digital, *press release*, brosur, pengumuman (infografis Haji), dan data-data statistik jamaah Haji. Selain itu, dalam *website* Kemenag RI juga menyajikan “Basis Data” meliputi daftar tunggu (*waiting list*), penyelenggaraan umrah, perkiraan keberangkatan dan operasionalisasi haji. Dari media inilah masyarakat dapat mengakses data informasi Haji, baik jumlah pendaftar calon jamaah Haji (*waiting list*) dan jamaah Haji yang telah diberangkatkan oleh Kementerian Agama RI. Sementara majalah yang dibuat oleh Kementerian Agama hanya bersifat internal dan tidak dapat dikonsumsi oleh publik.

Menurut data Kementerian Agama RI, pendaftar (*waiting list*) tercatat sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 mencapai 28.987 orang. Pada tahun 2010 sebanyak 3.594, tahun 2011 sebanyak 4.063, tahun 2012 sebanyak 5.547, pada tahun 2013 sebanyak 3736, pada tahun 2014 sebanyak 3.543, tahun 2015 sebanyak 3.671 dan tahun 2016 sebanyak 4.833. Sedangkan yang berangkat pada tahun 2010 sebanyak 1.132 orang, tahun 2011 sebanyak 1.132 orang, tahun 2012 sebanyak 1.132 orang, tahun 2013 sebanyak 1.132 orang, tahun 2014 sebanyak 906 orang, tahun 2015 sebanyak 906 orang dan tahun 2016 sebanyak 906 orang (Kemenag RI, 2017).

Tabel 1.1 Pendaftar (*waiting list*) Haji dan Berangkat Haji



Sumber: Arsip Kementerian Agama RI (Olah data 2017)

Keterangan: yang mendaftar Haji tahun, 2016 belum tentu berangkat Haji di tahun 2016

Data informasi Haji yang umumnya sering diakses oleh masyarakat adalah jenis data pendaftaran atau *waiting list*, selain itu informasi tentang mekanisme pemberangkatan, pemulangan, bahkan sampai pada pembatalan keberangkatan calon jamaah haji. Karena semakin meningkatnya pendaftaran Haji sepanjang tahun yang mengakibatkan antrian *waiting list* calon jamaah haji semakin panjang, Kementerian Agama kemudian membuat kebijakan baru tentang Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Keberadaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tentu dapat mengefisiensi penyelenggaraan tugas layanan ibadah haji dan memudahkan

pengecekan jadwal keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci. Calon jemaah haji bisa melakukan pengecekan berdasarkan nomor porsi yang sudah diterimanya melalui Siskohat di portal Kementerian Agama RI atau melalui aplikasi *smartphone* berbasis *Android*.

Siskohat ini dibuat dengan tujuan memudahkan calon jemaah untuk mengakses informasi porsi haji dan tahun keberangkatan yang disediakan oleh Kementerian Agama RI. Aplikasi ini membutuhkan koneksi data untuk dapat memberikan informasi mengenai tahun keberangkatan, porsi dan informasi lainnya, dan pengecekan melalui *online*. Siskohat sifatnya masih perkiraan dan bukan memastikan keberangkatan Haji. Namun demikian, pemutakhiran sistem teknologi informasi Haji secara terpusat melalui Siskohat Kementerian Agama RI tidak lepas dari permasalahan.

Permasalahan yang cukup signifikan adalah minimnya daya akses masyarakat terhadap informasi Haji, dimana Sistem Komputerisasi Haji (Siskohat) yang diterapkan oleh Kementerian Agama RI, menghendaki agar calon jemaah haji mampu menggunakan teknologi informasi dan media baru, baik internet maupun *smartphone*. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh informasi haji secara memadai terutama bagi sebagian masyarakat yang masih awam terhadap teknologi media baru (internet). Permasalahan ini juga ditengarai akan berimplikasi terhadap kinerja Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat sistem informasi haji dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Agama RI.

Sementara di sisi yang lain, keberadaan media massa lokal, baik surat kabar, media *online* dan televisi, lebih dekat atau mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam realitanya, media lokal memang sering mengangkat berita dan informasi mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji, namun tidak dipungkiri bahwa publikasi informasi

media cenderung berorientasi hanya untuk memenuhi kepentingan internal media itu sendiri. Dalam konteks inilah Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan perlu memanfaatkan potensi media dalam rangka penyebarluasan informasi Haji kepada publik, yakni dengan cara melakukan kerjasama dengan media massa lokal yang ada di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam untuk menganalisis tentang hubungan media Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016. Penelitian tersebut membutuhkan data-data empiris sehingga keterangan dari subjek atau informan sangat diperlukan, yakni Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan data empiris penelitian ini selanjutnya dikembangkan melalui perspektif teori *media relations*. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah ”*Media Relations* Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, maka fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis gambaran relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal terkait publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung proses hubungan Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal dalam publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pembaca terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan fokus pemaknaan yang lebih rinci dan tidak memunculkan penafsiran yang bermakna ganda. Dalam hal ini perlu diuraikan batasan judul dalam bentuk deskripsi fokus dengan menyederhanakan makna dari beberapa pokok dan istilah pada judul “*Media Relations* Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2016”.

a. Relasi media

Pengertian relasi media (*media relations*) menurut F.Jefkins (2002:10) adalah suatu usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Secara konseptual, istilah relasi media dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fungsi dan peran humas (pemerintah) dalam hal pemanfaatan media massa sebagai media untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dari aspek fungsional tersebut, diharapkan masyarakat memiliki daya akses terhadap media massa berkaitan dengan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Humas.

b. Humas

Istilah Hubungan Masyarakat (Humas) menurut Effendy (2007:131) sering disamakan dengan *public relation*, yakni orang-orang yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi yang melancarkan kegiatan *public relation*. Humas yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah Humas Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 13 Tahun 2011 (Pasal 1 ayat 3) Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan,

yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik. Sementara itu praktisi humas pemerintah adalah individu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi kehumasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara operasional dapat diartikan Humas Pemerintah adalah badan publik yang berkewajiban menyediakan informasi yang berorientasi pada informasi yang dibutuhkan publik untuk memenuhi kepentingan publik. Penyediaan informasi ini merupakan implementasi dari upaya memenuhi hak atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi. Adapun informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi penyelenggaraan Ibadah Haji yang dikelola oleh Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat yang berkoordinasi dengan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Seksi Sistem Informasi Haji) Kantor Wilayah Kementerian Agama RI.

c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah Sulawesi Selatan. Secara umum, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan (PMA 13/2012: Pasal 1 dan 4).

d. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pengertian Ibadah Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: *wukuf, mabit, thawaf, sa'i*, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT. dan mengharapkan ridha-Nya (Kemenag RI, 2014:67). Hukum Ibadah Haji adalah wajib bagi orang yang

pertama kali melaksanakan (memenuhi rukun Islam), dan bagi orang yang bernazar. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji hukumnya sunnah. Waktu mengerjakan ibadah haji di mulai sejak 1 Syawal hingga menjelang terbit fajar malam ke sepuluh Zulhijah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji, lembaga yang terkait dalam proses tersebut adalah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (PMA 13/2012: Pasal 26).

Berdasarkan deskripsi fokus yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini mencakup hubungan media dalam arti aktivitas komunikasi Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan menjalin hubungan dengan media massa lokal yang ada di Sulawesi Selatan dalam rangka diseminasi atau penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan ibadah Haji kepada masyarakat.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian. Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal terkait publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal dalam publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016?

D. Kajian pustaka

Salah satu penelitian yang mengangkat tentang hubungan antara Humas dengan media diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Aktivitas Humas Dalam Menjalankan Media Relations (Studi Deskriptif pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Yogyakarta)”, oleh Dedy Riyadin Saputro Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian Saputro menunjukkan bahwa Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai hal agar keharmonisan hubungan dengan media dapat terjaga. Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat formal dan non formal. Pertama, aktivitas formal *media relations* di antaranya dengan melakukan *press release*, jumpa pers, kerjasama penulisan dengan media cetak, kerjasama dengan media elektronik dan *press tour*. Kedua, kegiatan yang bersifat non formal diantaranya berupa, personal *relationship* (hubungan personal), Walikota Award dan *servicing* media yang meliputi pemberian tempat berupa gardu pawarta, penyediaan komputer dan *hot spot area*.

Penelitian lain yang mengangkat tema serupa adalah tugas akhir berjudul “Aktivitas *Media Relations* pada Perum Pegadaian Kanda VII Yogyakarta”, oleh E. Novianti Atik Kurniawati mahasiswa Program Diploma 3 UGM. Dalam penelitiannya di ungkapkan bahwa dalam menunjang hubungan yang baik dengan media humas

melakukan beberapa kegiatan seperti *press release*, konferensi pers, kerjasama dengan media elektronik dan media kliping. Sementara dari sisi internal, humas pegadaian juga terus melakukan perbaikan melalui *training* dan pendidikan seputar *media relations* bagi karyawan dan pimpinan agar dapat menghadapi wartawan tanpa rasa canggung dan salah langkah.



Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian

TINJAUAN PERBEDAAN		PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN		
		Penelitian 1	Penelitian 2	
NAMA PENELITI		Dedy Riyadin Saputro	E. Novianti Atik Kurniawati	Ahmad Ridha Akhzannur
JUDUL PENELITIAN		Aktivitas Humas Dalam Menjalankan Media Relations (Studi Deskriptif pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Yogyakarta)	Aktivitas <i>Media Relations</i> pada Perum Pegadaian Kanda VII Yogyakarta	<i>Media Relations</i> Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 di Kota Makassar
OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN		Humas dan Informasi Pemerintah Yogyakarta	Perum Pegadaian Kanda VII Yogyakarta	Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
METODE	Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
	Jenis Penelitian	Deskriptif	Dekriptif	Dekriptif
	Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, Dokumentasi dan Observasi	Observasi dan Wawancara	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
	Teknik Analisis Data	Teknik Filling System	Analisis Interaktif	Analisis Deskriptif
HASIL PENELITIAN PENELITIAN		Agar keharmonisan hubungan dengan media dapat terjaga, Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan dua jenis kegiatan, yaitu yang bersifat formal (<i>press release</i> , jumpa pers, kerjasama penulisan dengan media cetak, kerjasama dengan media elektronik dan press tour) dan non formal (personal relationship (hubungan personal), Walikota Award dan servicing media yang meliputi pemberian tempat berupa gardu pawarta, penyediaan komputer dan hot spot area)	Dalam menunjang hubungan yang baik dengan media humas melakukan beberapa kegiatan seperti <i>press release</i> , konferensi pers, kerjasama dengan media elektronik dan media kliping. Sementara dari sisi internal, humas pegadaian juga terus melakukan perbaikan melalui <i>training</i> dan pendidikan seputar <i>media relations</i> bagi karyawan dan pimpinan agar dapat menghadapi wartawan tanpa rasa canggung dan salah langkah.	Humas Kanwil Kemenag Sulsel berperan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji, secara <i>eksternal</i> membangun relasi dengan media massa (cetak, elektronik, <i>online</i>), kemudian model komunikasi yang terjadi dalam konteks <i>media realtions</i> antara Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media massa lokal, mencakup tiga aspek yaitu, <i>Public Information</i> , <i>Two-way Asymmetric</i> dan <i>Two-way Symmetric</i> .

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal terkait publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan media lokal dalam publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya melalui studi tentang *Media Relations* (relasi media) yang merupakan salah satu aktivitas kehumasan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada khalayak tentang relasi media yang tepat digunakan oleh Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsep Hubungan Masyarakat (Humas)*

Hubungan masyarakat (Humas) merupakan terjemahan bebas dari istilah *public relations* (PR), kedua istilah ini akan digunakan secara bergantian berdasarkan bentuk komunikasi yang diselenggarakan organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan di dalamnya. Menurut definisi kamus terbitan *Institute of Public relations* (IPR), yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan bulan November 1987, “Humas adalah keseluruhan upaya yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak”. Jadi, humas merupakan suatu kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sebagai rangkaian kampanye atau program yang terpadu dan semuanya berkelanjutan secara teratur (Linggar Anggoro, 2001 : 1-2)

Humas atau *public relations* merupakan ilmu terapan dan jembatan semua aspek kehidupan. Suatu investasi strategis dalam mendapatkan target dalam berbagai kegiatan, baik bisnis, sosial maupun *personal image*. Konsep *public relations* merupakan dasar pemikiran yang diimplementasikan dalam program komunikasi dalam *guest relation, sales promotion, marketing communication, publikasi, komunikasi internal, materi promosi bahkan periklanan* (Ika Sastrosuebrot, 2013 : 24).

Di lain pihak, *Public relations Society of America* (PRSA), sebuah organisasi *public relations* yang terbentuk pada tahun 1947 di Amerika, pada tahun 2002 merumuskan aktivitas - aktivitas humas sebagai berikut:

1. *Community Relations.*

Hubungan publik yang memfokuskan diri pada komunitas yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi/perusahaan.

2. *Counseling.*

Para profesional *public relations* hendaklah secara rutin memberikan masukan/pertimbangan kepada pihak manajemen sebelum mereka mengambil keputusan, membuat kebijakan, membangun relasi, atau melakukan komunikasi dengan berbagai macam publik. Jajaran manajemen menyatakan kepada publik ‘apa yang mereka lakukan’ sedangkan profesional atau bagian humas membantu mendefinisikan dan mempresentasikan pesan tersebut untuk sampai ke publik.

3. *Development/Fundraising.*

Semua organisasi baik yang profit maupun non-profit dapat bertahan karena ada kontribusi dari berbagai pihak dalam bentuk waktu maupun uang. Peran humas yang menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan organisasi tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki peluang dan atau kemampuan memberikan kontribusi.

4. *Employee/Member Relations.*

Sebagai bagian inti dari jalannya perusahaan, tugas *Public relations* untuk menciptakan hubungan-hubungan yang baik, tidak hanya sekadar pada para pekerja melainkan juga kepada keluarga pekerja. Dengan demikian akan terbentuk motivasi yang baik pula dan moral yang tinggi dari para pekerja sehingga loyal pada perusahaan.

5. *Financial Relations.*

Investor merupakan salah satu bagian terpenting dari sumber pendanaan perusahaan. Peran *public relations* adalah membangun jembatan komunikasi antara investor - pemilik perusahaan, para pemegang saham, komunitas finansial seperti bank, dan publik.

6. *Government Affairs.*

Inilah tipe aktivitas *public relations* yang memfokuskan diri menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan. Karena sebagai perusahaan publik, tidak bisa dilepas - pisahkan hubungannya dengan pemerintahan.

7. *Industry Relations.*

Perusahaan tidak hanya menjalin relasi yang terbatas pada konsumen/pelanggan semata, melainkan juga harus menciptakan relasi yang baik dengan perusahaan lain yang secara langsung berkaitan dengan bisnis perusahaan seperti para supplier, distributor, agen bahkan relasi terhadap perusahaan kompetitor sekaligus.

8. *Issues Management.*

Manajemen isu melibatkan publik dalam jumlah besar demi terciptanya citra produk maupun citra dari perusahaan. Aktivitas *public relations* untuk mengembangkan manajemen isu ini sebagai bagian dari kekuatan perusahaan/organisasi.

9. *Media Relations.*

Perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap bentuk-bentuk media massa memberikan pengaruh yang berarti bagi perusahaan. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan yang baik pula bagi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk perusahaan, dan akhirnya menumbuhkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Aktivitas *public relations* inilah yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan dari liputan media.

10. *Marketing Communication.*

Kombinasi dari *aktivitas* menjual produk, servis, maupun ide dan iklan-iklan yang dilakukan melalui berbagai media memberikan efek yang menguntungkan pada *aktivitas public relations*. Bentuk kemasan produk yang unik dan bagaimana memajang produk di pasar merupakan terpaan dari pembentukan citra dari perusahaan yang membedakan dari perusahaan lainnya.

11. *Minority Relations/Multicultural Affairs.*

Aktivitas humas yang memfokuskan diri pada terbentuknya relasi pada kelompok minoritas yang secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak publisitas perusahaan.

12. *Public Affairs.*

Interaksi humas yang melibatkan para ofisial dan pemimpin dari berbagai bentuk organisasi atau para pemegang kekuasaan. Relasi dengan komunitas maupun pemerintahan merupakan fokus dari aktivitas *public relations*.

13. *Special Events and Public Participant.*

Aktivitas langsung yang melibatkan publik dan dilakukan oleh *public relations* untuk menjalin interaksi antara organisasi/perusahaan dengan publik.

Sebagai sebuah saluran atau penyuar organisasi untuk menjangkau publiknya, media dalam hal ini memiliki peranan yang cukup signifikan dalam aktivitas *public relations* dengan tanpa mengesampingkan aktivitas-aktivitas lainnya. Kekuatan media yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu menjaga citra yang selama ini akan dan telah dibangun oleh sebuah organisasi.

Di bidang kehumasan pemerintah memiliki dua tugas pokok berupa tugas strategis dan tugas taktis. Secara strategis, humas pemerintah ikut berperan serta dalam *decision making procces*. Sementara untuk tugas taktis, humas pemeritah

memiliki peran memberikan informasi kepada publik, menjalankan komunikasi timbal balik dan menciptakan citra yang baik bagi institusinya. (H.A.W Widjaja, 2008 : 63)

Dalam menyiarkan informasinya, pejabat humas pemerintah tentunya membutuhkan peran serta media untuk mempublikasikan seluruh aktivitas yang telah dijalankannya. Sehingga wajar bila dikatakan hubungan humas dan media merupakan hubungan dua arah. Disatu pihak, organisasi menyediakan informasi dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada pers apabila diminta sebaliknya pihak pers memberikan komentar-komentar dan menyiarkan berita. Sehingga dalam upaya membina media relations, maka humas melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan media massa atau pers (Elvinaro dkk, 2007 : 182 - 183), diantaranya:

1. Konferensi pers

Temu pers atau jumpa pers yaitu informasi yang diberikan secara berbarengan oleh seseorang dari pejabat pemerintah kepada sekelompok wartawan, bahkan bisa ratusan wartawan. Biasanya pihak humas berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan para wartawan tentang suatu topik pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan.

2. *Press breafing*

Press breafing yaitu pemberian informasi diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat humas. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi - informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada pers, juga diadakan tanggapan atau pertanyaan bila wartawan belum puas dan menginginkan keterangan lebih terperinci.

3. *Press tour*

Kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu dan mereka (media/pers) diajak menikmati objek wisata yang menarik. Keuntungan dari kegiatan ini ialah wartawan akan merasa dianggap sebagai bagian “keluarga sendiri” oleh organisasi, sehingga secara batiniah wartawan akan punya hubungan emosional.

4. *Press release*

Siaran pers sebagai publisitas, yaitu media yang banyak digunakan dalam kegiatan humas untuk menyebarkan berita.

5. *Special event*

Spesial event yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan humas yang penting dan memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan, yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik, seperti pameran, lokakarya, *open house* dan lainnya. Dalam kegiatan ini humas biasanya mengundang media atau pers untuk meliputnya.

6. *Press luncheon*

Press lunchion yaitu pejabat humas mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen perusahaan/lembaga guna mendengarkan perkembangan lembaga tersebut.

7. Wawancara pers

Wawancara pers yaitu wawancara yang sifatnya lebih pribadi, lebih individu. Humas atau pimpinan puncak yang diwawancari hanya berhadapan dengan wartawan atau reporter yang bersangkutan. Meskipun pejabat itu di wawancarai seusai meresmikan suatu acara oleh banyak wartawan, tetap saja wawancara itu bersifat individu.

Selain itu dengan memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam era transparansi, globalisasi, demokratisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka praktisi humas, khususnya pejabat humas di lingkungan pemerintahan dalam pelayanan informasi publik, perlu melakukan reposisi dan peningkatan peran serta fungsinya. Sehingga untuk melakukan reposisi dan meningkatkan peran dan fungsi tersebut, praktisi humas di lingkungan pemerintahan, disamping memiliki dan berkemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip - prinsip batasan moral, budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

B. *Teori Media Relations*

1. Pengertian Relasi Media

Philip Lesly memberikan definisi *media relations* sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Apa yang di uraikan *Lesly* ini lebih pada sisi manfaat yang diperoleh organisasi dan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam menjalankan media relations. Manfaat tersebut berupa publisitas. Sedangkan kegiatan yang bisa menopang publisitas itu adalah merespon kepentingan media.

Sementara itu *Frank Jefkins* mendefinisikan hubungan media sebagai usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan (Nurudin, 2008 :12)

Dalam menjalankan tugasnya *public relations* membutuhkan media massa untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat (dalam hal ini publik) dan

media massa membutuhkan *public relations* sebagai sumber berita bagi media tersebut. (Rini Darmastuti, 2012 : 3-4)

Dari definisi di atas bisa dikatakan bahwa hubungan media itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan humas secara sederhana, bila digambarkan arus komunikasi dalam praktik media relations itu akan muncul seperti berikut:



Gambar 2.1 Arus Komunikasi Media Relations

Sumber: Rini Darmastuti, 2005. Media Relations: Konsep, Strategi dan Aplikasi.

Di era sekarang ini, media massa mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan. Transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), transfer informasi, bahkan komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media massa. Media massa yang dipahami terbagi dalam tiga konteks, yaitu media cetak, media elektronik dan media baru. (Rini Darmastuti, 2012 :21)

a. Media Cetak

1) Surat kabar

Dalam pekerjaan seorang *public relation*, surat kabar memiliki peran yang sangat besar. Di dalam surat kabar seorang *public relations* dapat menyampaikan iklan, berita, *advertorial*, bahkan komik maupun cerita bersambung yang dapat digunakan untuk membangun citra perusahaan atau organisasi yang diwakili. Selain membangun citra perusahaan atau organisasi yang diwakili, seorang *public relations* dapat menggunakan surat kabar untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja.

2) Majalah

Dalam pekerjaan seorang *public relations*, majalah lebih banyak digunakan untuk menjangkau masyarakat yang khusus. Melalui majalah, seorang *public relations* dapat menyampaikan iklan, berita, *advertorial*, *infotorial* dan *corpotorial*. Selain itu, majalah juga dapat mengangkat topik-topik tertentu yang sedang hangat dan berkembang di masyarakat, yang sesuai dengan kekhususan majalah tersebut untuk didiskusikan dengan narasumber dari perusahaan atau organisasi tempat *public relations* itu berada.

b. Media Elektronik

1) Televisi

Televisi merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat kita. Fakta ini menunjukkan bahwa televisi dapat menjangkau masyarakat dan terlebih dapat digunakan sebagai media yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pekerjaan *public relations*, ada banyak cara yang dapat digunakan oleh seorang *public relations* untuk menjangkau khalayak melalui kegiatan *media relations* dengan menggunakan televisi, di antaranya adalah membuat acara *talk show*, komunikasi interaktif, dan iklan.

2) Radio

Pada saat ini kehadiran televisi telah mengubah fungsi radio di tengah masyarakat. Akibatnya, radio mulai mengubah program-program mereka kepada khalayak dengan menggantinya seperti program-program yang ada di televisi. Radio berusaha melayani khalayak pada segmen dan kelompok-kelompok tertentu. Bagi seorang *public relations*, radio mempunyai peranan yang sangat besar untuk membangun citra perusahaan atau organisasi tempat mereka berada.

Melalui radio, mereka dapat membuat acara diskusi interaktif, iklan, maupun berita tentang organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Bahkan

tidak menutup kemungkinan pencitraan sebuah organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja dapat dilakukan dengan membuat sandiwara radio.

c. Media Baru (*New Media*)

Sekarang internet hadir dengan segala aktivitas yang dimiliki sebagai media komunikasi yang paling populer dalam kehidupan masyarakat. Melalui internet, setiap orang dapat mengakses berita dan informasi dari belahan dunia lain ataupun dari daerahnya sendiri. Internet dapat juga digunakan sebagai media hiburan bahkan media pendidikan yang menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan.

Internet juga menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan menggunakan internet, orang dapat mengirimkan pesannya lewat *e-mail* maupun membangun jaringan dengan orang lain melalui *facebook*, *twitter* ataupun melalui forum-forum lainnya.

Perkembangan internet dapat digunakan oleh *public relations* untuk menyampaikan pesan-pesan serta informasi-informasi dari perusahaan ataupun organisasi tempat mereka berada. Pesan yang mereka sampaikan yaitu berupa berita perkembangan perusahaan, perubahan sistem, *launching* produk baru, maupun berupa iklan. (Rini Darmastuti, 2012 :62-68)

Adapun hal-hal terpenting perihal media atau pers yang harus diketahui oleh seorang praktisi *public relations*:

- a. Kebijakan *editorial*. Hal ini merupakan pandangan dasar dari suatu media yang dengan sendirinya akan melandasi pemilihan subjek - subjek yang akan dicetak atau yang akan diterbitkannya.
- b. Frekuensi penerbitan. Setiap terbitan punya frekuensi penerbitan yang berbeda-beda, bisa harian, mingguan, dua mingguan, dua kali seminggu, bulanan, tiga bulanan, atau bahkan tahunan. Jumlah edisi yang diterbitkan dalam satu kali penerbitan juga perlu diketahui oleh para praktisi humas.

- c. Tanggal terbit. Kapan tanggal dan saat terakhir sebuah naskah harus diserahkan ke redaksi untuk penerbitan yang akan datang. Hal ini ditentukan oleh frekuensi dan proses percetakannya.
- d. Proses percetakan. Apakah suatu media dicetak secara biasa (*letterpress*) atau dengan teknik lainnya.
- e. Daerah sirkulasi. Apakah jangkauan sirkulasi dari suatu media tersebut berskala lokal, khusus di daerah pedesaan, perkotaan, berskala nasional, ataukah berskala internasional. Untuk koran berskala provinsi, daerah bagian manakah yang terjangkau, teknologi satelit memungkinkan dilakukannya sirkulasi atau distribusi media secara internasional.
- f. Jangkauan pembaca. Seorang praktisi *public relations* harus mengetahui berapa dan siapa saja yang membaca jurnal atau media yang bersangkutan.
- g. Metode distribusi. Praktisi *public relations* juga perlu mengetahui metode-metode distribusi dari suatu media, apakah itu melalui toko-toko buku, diijalkan secara langsung atau secara terkontrol melalui pos atas permintaan atau seleksi. (Linggar Anggoro, 2001 : 154)

2. Model Relasi Media

Public relations dan media massa dalam menjalankan tugasnya harus tetap saling menjaga hubungan agar tetap harmonis. Model hubungan *public relations* dengan media massa dibagi menjadi empat, yaitu:

a. *Press Agency/Publicity*

Bentuk hubungan antar *public relations* dan media pada model *press agency* atau *publicity* adalah bentuk hubungan dengan tujuan untuk propaganda. Dalam hubungan ini, hubungan antara *public relations* dengan media massa lebih menekankan kepada hubungan bisnis dengan penekanan pada kepentingan *public relations*. *Public relations* menjalin hubungan dengan media massa untuk tujuan

memersuasi khalayak. Dengan kata lain, media massa digunakan oleh *public relations* sebagai media yang mempermudah dalam menjangkau khalayak dan memersuasi khalayak.

Komunikasi yang terjadi antara *public relations* dengan media massa adalah komunikasi satu arah. *Public relations* memberikan pesan kepada media massa, kemudian media massa melakukan seperti apa yang diinginkan oleh *public relations*.



Gambar 2.2 Model hubungan *public relations* dengan media massa
Model Press Agency / Publicity

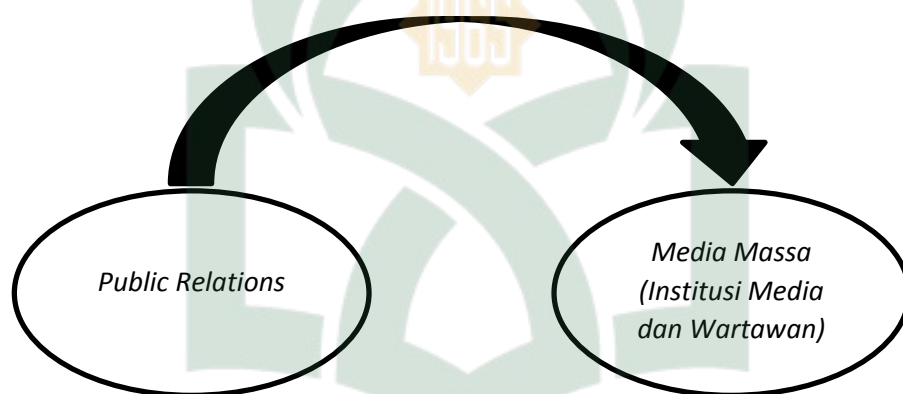
Pada model ini, *public relations* berusaha untuk menyebarkan keyakinan tentang keterlibatan organisasi mereka melalui media massa, dalam bentuk propaganda karena *public relations* sudah membayar sejumlah uang kepada media massa sesuai dengan yang sepakati. *Public relations* biasanya menggunakan model ini untuk keperluan promosi produk maupun promosi jasa.

b. Public Information

Model ini digunakan *public relations* dalam menjalin hubungan dengan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan tidak selalu dengan tujuan memersuasi. Dalam model ini, *public relations* berfungsi sebagai jurnalis dari dalam organisasi. Tugas mereka adalah untuk melaporkan secara objektif informasi tentang organisasi mereka kepada publik. Dalam model hubungan ini *public*

relations dengan wartawan maupun dengan institusi media adalah sebagai teman yang saling membantu dan saling melengkapi dalam penyediaan informasi.

Model hubungan ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan informasi-informasi yang dimiliki oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Tetapi informasi-informasi yang dipublikasikan oleh *public relations* kepada khalayak dengan menggunakan media massa adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, informasi tidak berhubungan dengan iklan atau promosi.



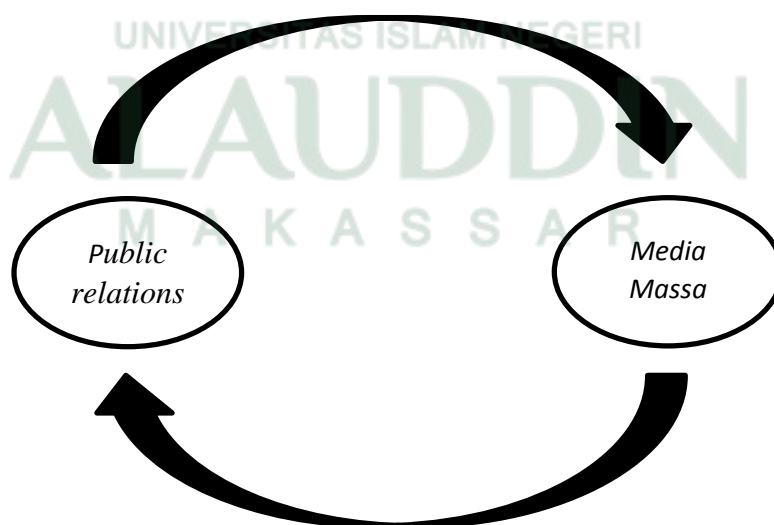
Gambar 2.3 Model hubungan *public relations* dengan media massa
Model Public Information

Pada model hubungan ini, *biasanya public relations* menggunakan bentuk-bentuk tulisan *future* (seperti infotorial) untuk menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan mereka bekerja. Model ini lebih banyak digunakan oleh pemerintah dan asosiasi yang tidak mencari keuntungan untuk menyampaikan informasi-informasi dari perusahaan atau organisasinya.

c. *Two-way Asymmetric*

Model hubungan antara *public relations* dengan media massa ini memiliki fungsi yang lebih di banding dengan *Model Pers Agency* atau *Publicity*, sekalipun tujuan mereka lebih baik dari sekedar persuasi ilmiah. Pada saat menggunakan model hubungan ini, biasanya praktisi *public relations* menggunakan pengetahuan dari teori ilmu sosial dan penelitian tentang sikap dan perilaku untuk mengajak publik menerima sudut pandang *public relations* tentang organisasi. Tujuannya adalah khalayak memiliki cara untuk memberikan dukungan kepada organisasi, disamping *public relations* juga berusaha membangun kelogisan kepada khalayak dengan diajak berpikir secara ilmiah.

Komunikasi yang terjadi antara *public relations* dengan media massa adalah komunikasi dua arah, tetapi tidak seimbang. Komunikasi memang terjadi antara komunikator dengan komunikan, tetapi komunikasinya tidak berimbang. Memang umpan balik sudah terjadi dalam komunikasi ini dari komunikan, tetapi umpan balik sangat terbatas. Bentuk komunikasi dalam model ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.4 Model hubungan *public relations* dengan media massa
Model Two-way Asymmetric

Penelitian pada model hubungan antara *public relations* dengan media massa ini bersifat formatif, evaluasi dari tindakan. Bentuk komunikasi pada model ini biasanya digunakan dalam persaingan bisnis dan dunia periklanan.

d. *Two-way Symmetric*

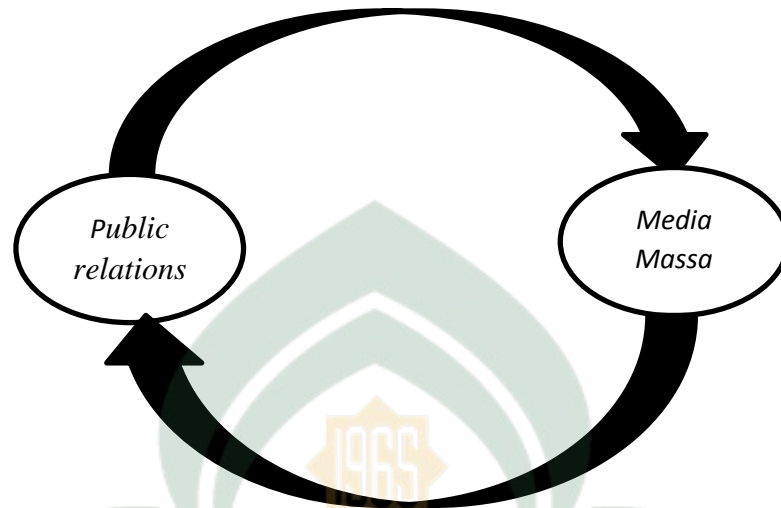
Dalam model *two way symmetric*, praktisi *public relations* lebih berperan sebagai mediator antara organisasi dan public mereka. Karena kepentingan ini, maka hubungan yang terjadi antara *public relations* dengan media massa (Institusi media dan wartawan) pada model hubungan *two-way symmetric* adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menguntungkan untuk mendukung pekerjaan masing-masing.

Model komunikasi ini mempunyai tujuan untuk membentuk keadaan yang saling memahami antara *public relations* dan media massa, saling memahami yang dimaksud adalah saling pengertian antara institusi media dengan organisasi tempat mereka bekerja, maupun saling pengertian antara organisasi dengan public mereka.

Dalam model *two way symmetric*, praktisi *public relations* lebih berperan sebagai mediator antara organisasi dan publik mereka. Karena kepentingan ini, maka hubungan yang terjadi antara *public relations* dengan media massa (Institusi media dan wartawan) pada model hubungan *two-way symmetric* adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menguntungkan untuk mendukung pekerjaan masing-masing. Model komunikasi ini mempunyai tujuan untuk membentuk keadaan yang saling memahami antara *public relations* dan media massa, saling memahami yang dimaksud adalah saling pengertian antara institusi media dengan organisasi tempat mereka bekerja, maupun saling pengertian antara organisasi dengan public mereka.

Pada model hubungan ini, komunikasi yang dilakukan antara *public relations* dengan media massa adalah komunikasi dalam dua arah dengan efek yang

seimbang. Biasanya komunikasi dilakukan dalam komunikasi dari kelompok ke kelompok. Model ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Model hubungan *public relations* dengan media massa
Model Two-way Symmetric

Penelitian tentang hubungan antara *public relations* dengan media massa dalam model ini biasanya bersifat formatif serta untuk mengevaluasi permasalahan, contohnya adalah penelitian yang berhubungan dengan pemimpin-pemimpin professional yang mengatur bisnis dan periklanan. (Rini Darmastuti, 2012 :137-142)

C. Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pandangan Islam

1. Pengertian dan Dasar Kewajiban Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istita'ah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Secara etimologi, haji berasal bahasa Arab yaitu *haj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung (al-Jaziri, 2010:324 dan Munawwir, 1997:237). Dalam perspektif fiqih, haji adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah, dan seluruh

rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya (al-Sayyid Sabiq, 2004:317).

Pengertian ibadah haji juga ditemukan dalam uraian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Sementara dasar kewajiban ibadah haji, Menurut al-Jaziri (2010:324) merupakan hal yang diwajibkan bagi setiap Muslim dan Muslimah yang mampu (*istitha'ah*), sekali seumur hidup. Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ditetapkan berdasarkan *al-Qur'an*, Sunnah, dan Ijma. Dasar kewajiban haji adalah firman Allah dalam Q.S Al-Imran/3: 96-97.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam

Kewajiban pelaksanaan ibadah haji juga dijelaskan dalam *hadits*. Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhuma*, berkata; Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

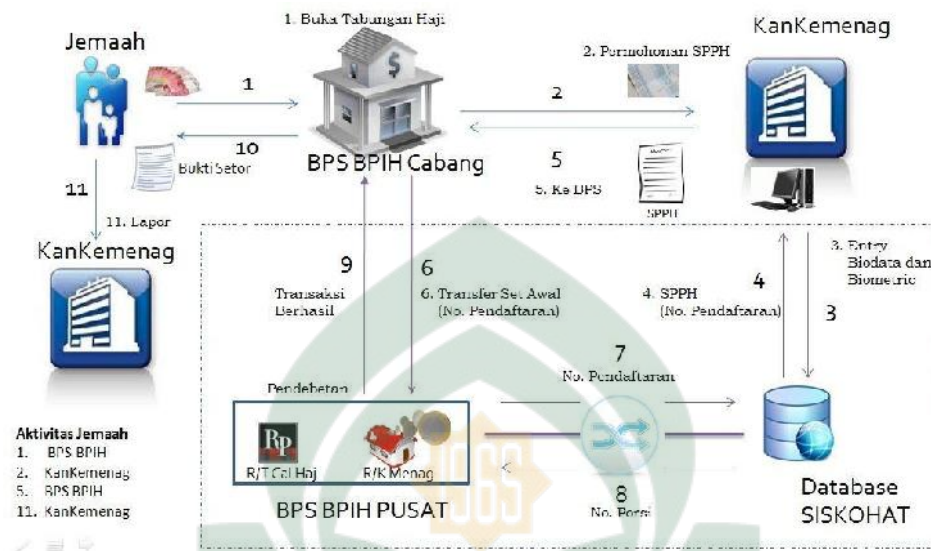
Islam itu dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji (HR.Bukhari dan Muslim).

Kewajiban haji ditekankan kepada orang-orang Islam yang memiliki kemampuan atau kesanggupan (*istitha'ah*) karena memang tugas itu berat dan memerlukan biaya yang tidak murah. Bagi mereka yang bertempat tinggal jauh, tidak ditolak penafsiran para ulama tentang makna *istitha'ah* yang berarti sehat jasmani dan rohani, mampu melaksanakan perjalanan, memiliki perbekalan yang cukup, aman di perjalanan, serta khususnya aman pula di Tanah Suci, namun *istitha'ah* itu berbeda sesuai kondisi masing-masing orang, dan Tuhan tetap sayang kepada orang tidak mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah (Nawawi, 2002:192).

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Secara garis besar proses penyelenggaraan Ibadah Haji terbagi atas tiga tahap, yaitu pendaftaran, pemberangkatan dan pemulangan. Tahap pendaftaran calon jamaah haji dimulai dari membuka tabungan haji, permohonan surat pendaftaran pergi haji (SPPH), *entry* biodata dan *biometric*, SPPH (nomor pendaftaran), ke BPS, transaksi awal, nomor pendaftaran, nomor porsi, transaksi berhasil, bukti stor dan kemudian melapor di kantor Kementerian Agama setempat.

Gambar 2.6 Proses Pendaftaran Haji



Sumber: webiste resmi Kanwil Kemenag Sulsel, <http://sulsul.kemenag.go.id>

Tahap pemberangkatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diperkirakan, sebelum berangkat ke tanah suci para jamaah terlebih dahulu dibekali pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan ibadah haji yang benar dan sesuai rukun-rukunnya dengan cara mengikuti manasik haji, pemberangkatan dibagi atas beberapa gelombang. Tahap pemulangan juga dilakukan sesuai dengan jadwalnya dan dibagi beberapa gelombang untuk proses pemulangan.

Ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan penutup dan penyempurna dari keislaman seseorang di hadapan tuhan. Hikmah ibadah haji ini sangat banyak sekali yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tata urutan rukun dan wajib haji yang dilaksanakannya (Kemenag RI, 2014: 72). Adapun jenis-jenis pelaksanaan ibadah haji diuraikan sebagai berikut:

- a. Haji *Tamattu'*, ialah mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru mengerjakan haji Pada tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji yang melaksanakan haji *tamattu'*

mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil miqat di pemondokan.

- b. Haji *Ifrad*, ialah mengerjakan haji saja. Cara ini tidak wajib membayar *Dam*, pelaksanaan haji dengan cara *ifrad* ini dapat dipilih oleh jemaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf ± 5 (lima) hari sebelum wukuf.
- c. Haji *Qiran*, ialah mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar *Dam Nusuk* sesuai ketentuan syari'ah (Kemenag RI, 2014: 74-143).

Selain ketiga istilah di atas, terdapat istilah Haji *badal*, yaitu haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena uzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau dalam kondisi sakit parah) sehingga dia tidak dapat melaksanakan sendiri. Adapun syarat orang yang melakukan haji *badal* ialah dia harus memenuhi syarat wajib haji dan sudah haji untuk dirinya.

3. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Ibadah haji diwajibkan bagi kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya baik yang kedua atau seterusnya hukumnya sunat. Tetapi bagi mereka yang bernazar haji menjadi wajib melaksanakannya. Adapun yang menjadi syarat Haji adalah:

- a. Islam
- b. *Baligh* (dewasa)
- c. *Aqil* (berakal sehat)
- d. Merdeka (bukan hamba sahaya)
- e. *Istitha'ah* (mampu), yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan

Sedangkan rukun haji ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Rukun haji adalah:

- a. *Ihram* (niat)
- b. *Wukuf* di Arafat
- c. *Thawaf* ifadhah
- d. *Sa'i*
- e. Cukur
- f. Tertib

Wajib haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan sah hajinya akan tetapi harus membayar dam; berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada *uzur syar'i*. Wajib haji adalah:

- a. *Ihram*, yakni niat berhaji dari *Miqat*
- b. *Mabit* di Muzdalifah
- c. *Mabit* di Mina
- d. Melontar *Jamrah Ula*, *Wustha* dan *Aqabah*.
- e. *Thawaf wada'* bagi yang akan meninggalkan Makkah (Kemenag RI, 2014: 67-71).

D. *Kerangka Konseptual*

Kerangka konseptual dalam penelitian berperan untuk mengidentifikasi hubungan antar konsep-konsep teoretis yang dianggap penting bagi masalah yang sedang diteliti. Secara garis besar, penelitian ini menggunakan teori relasi media (*media relations*) yakni suatu usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan

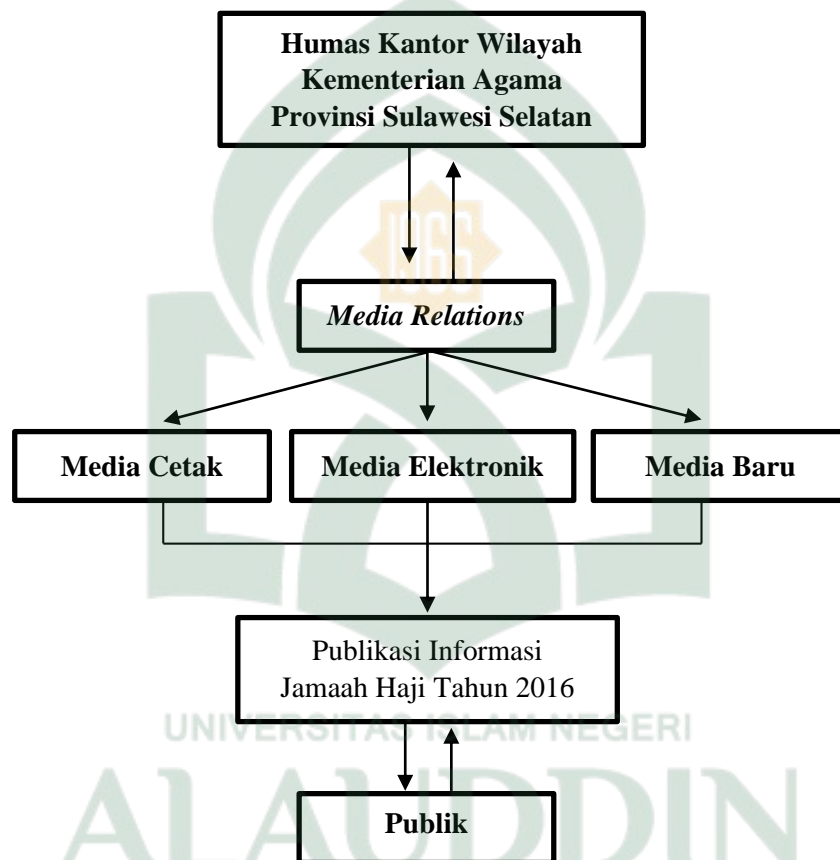
pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (F.Jeffkins (2002:10).

Selain teori *media relation*, penelitian ini juga menggunakan konsep humas pemerintah dan konsep Islam tentang pelaksanaan ibadah haji. Humas pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik. Sementara itu praktisi humas pemerintah adalah individu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi kehumasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Permendagri No 13 Tahun 2011: Pasal 1 ayat 3). Sedangkan pengertian ibadah Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: *wukuf*, *mabit*, *thawaf*, *sa'i*, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Swt. Dan mengharapkan ridha-Nya (Kemenag RI, 2014:67).

Berdasarkan konsep teoretis yang telah dipaparkan, maka istilah relasi media dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis fungsi dan peran humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pemanfaatan media massa sebagai media untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan ibadah haji. Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun informasi penyelenggaraan ibadah Haji dikelola oleh Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat yang berkoordinasi dengan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Seksi Sistem Informasi Haji) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kaitannya dengan teori *media relation*, media massa terbagi dalam tiga konteks, yaitu media cetak, media elektronik dan media baru (Rini Darmastuti, 2012 :21). Dari sudut pandang tersebut, maka hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara Humas Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan dengan Media Massa Lokal, antara lain media penerbitan yaitu Harian Rakyat Sulsel,

www.rakyatsulsel.com dan media penyiaran televisi yaitu TVRI, maupun hubungan kedua lembaga tersebut dengan publik sebagai khalayak informasi yang mengakses informasi haji melalui media. Berikut diuraikan dalam bentuk bagan kerangka konseptual mengenai hubungan antar konsep penelitian ini:



Gambar 2.7 Karangka Konseptual Pengembangan Relasi Media Model *Two-Way Symmetric*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005: 54).

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena yang berkaitan dengan aktivitas relasi media Humas Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Nuri No. 53 Makassar, Indonesia. Waktu penelitian dimulai sejak ditetapkannya pengesahan judul tepatnya pada tanggal 18 November 2016.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam konteks penelitian terbagi atas pendekatan keilmuan dan pendekatan metodologi. Pendekatan keilmuan dalam hal ini adalah ilmu komunikasi khususnya mengenai *public relation* atau hubungan masyarakat (Humas). Secara spesifik, ilmu hubungan masyarakat yang dimaksud berkaitan dengan teori *media relations* (relasi media). Sementara itu, praktisi Humas yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pendekatan metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Lexy, 2007 : 6).

C. Sumber Data

Pengambilan data-data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan-informan guna memperoleh informasi mengenai relasi media dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 di Sulawesi Selatan. Informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai masalah dan topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi empat, yaitu

1. Observasi

Data diperoleh melalui observasi secara langsung maupun tidak langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut akan menjadi pendukung terhadap data yang diperoleh secara wawancara.

2. Wawancara

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dari sejumlah informan dari dua lembaga, yakni dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan informan dari media massa lokal di Makassar. Wawancara dilakukan secara terstruktur melalui instrumen panduan wawancara agar data yang dikumpulkan lebih terarah sesuai fokus permasalahan penelitian. Proses pemilihan informan

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan dengan pertimbangan kriteria tertentu, antara lain kapabilitas, kompetensi dan pengalamannya di bidang kehumasan khususnya di lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Informan dengan kriteria tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban yang komprehensif mengenai *media relation* Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Daftar Informan

Kategori	Subkategori	Nama
Kanwil Kemenag Provinsi Sul-Sel	Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah	1. Dr. H. Kaswad Sartono, S.Ag., M.Ag
	Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas	2. H. Ahmad Husain
	Bagian Pers dan Berita	3. Mawardi
Media Massa	Rakyat Sulsel (cetak)	1. Muh. Fahrullah
	Rakyat Sulsel (<i>online</i>)	2. Muh. Fahrullah
	TVRI	3. Anto Bahri Rasyid

3. Studi Dokumentasi

Data diperoleh dari dokumentasi aktivitas relasi media Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen yang terkumpul adalah dokumen resmi, baik dokumen internal maupun eksternal yang berkaitan dengan relasi media dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan buku-buku tentang komunikasi, Humas/PR, dan *media relations* serta asrip atau catatan-catatan penting yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Instrumen Penelitian

Pengertian instrumen penelitian yang dikemukakan oleh Arikunto adalah merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrument akan menentukan kualitas data yang terkumpul (Nurul Zuriah, 2009:168). Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara terhadap informan berupa panduan wawancara (*interview guide*) dan instrumen observasi untuk mengumpulkan data-data berdasarkan objek yang akan diteliti adalah kamera, hp (*handphonne*), buku dan alat tulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman metode dalam analisis data kualitatif terbagi tiga yaitu reduksi data, model data dan penarikan/verifikasikesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana diketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasi secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data, yakni membuat

rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo.

Reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu teks naratif. Teks Naratif berbetuk catatan lapangan, Model ini mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis.

Pada umumnya teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alurkausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami (Emzir. 2011 : 129-130)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Secara nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2010, terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama diubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Adapun bagian Hubungan Masyarakat (Humas) terutama ditingkat pusat Kementerian Agama disebut sebagai Biro Humas, Data, dan Informasi, dimana Pasal 123 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Biro Humas, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan serta evaluasi di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi.

Sementara itu, kedudukan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Pasal 817 huruf g, PMA No.13 Tahun 2012

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dimana Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi “pelayanan informasi dan hubungan masyarakat”. Lebih lanjut dalam Pasal 818 huruf d, PMA No.13 Tahun 2012 dijelaskan bahwa salah satu Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha adalah “Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat”. Dengan demikian terdapat fungsi kehumasan dalam struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Berkenaan dengan tugas Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, juga diatur dalam Pasal 819 huruf ayat 4 PMA No.13 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat. Dari aspek ini dapat diketahui bahwa Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas yang signifikan terutama menyangkut publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji kepada publik.

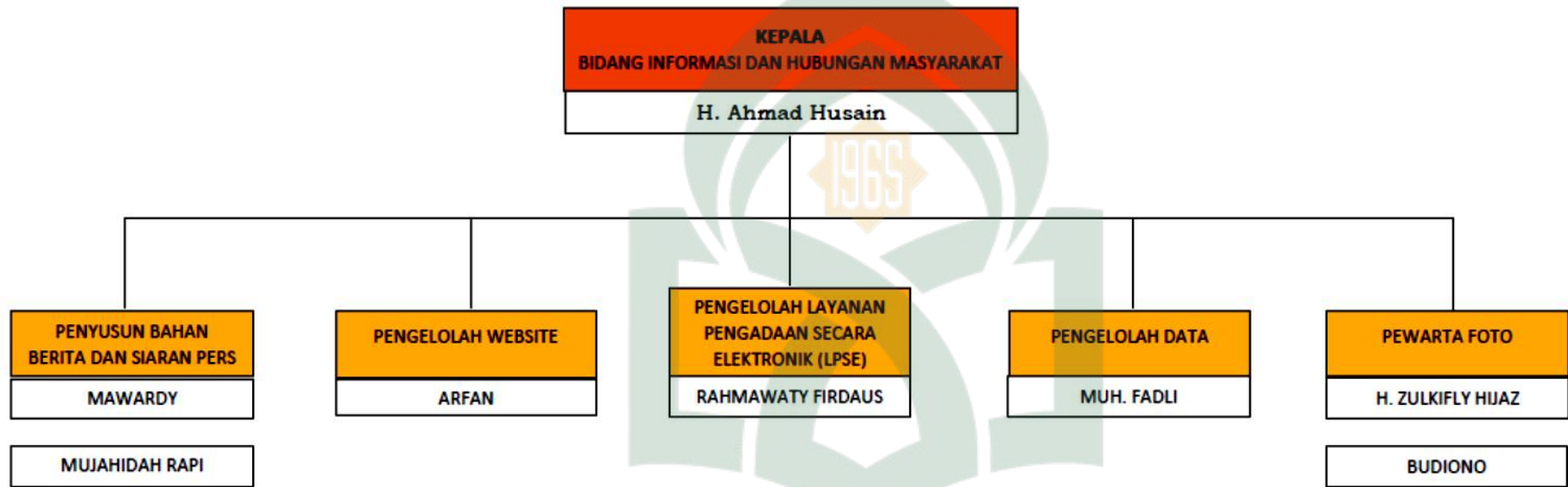
Tugas Humas Kemenag untuk mempublikasi informasi didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama, dimana kebijakan ini berdasarkan regulasi pelayanan publik dan regulasi informasi publik, antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- c. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008

Berikut diuraikan secara detail mengenai struktur organisasi Bidang Informasi dan Humas, dan struktur organisasi Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan:

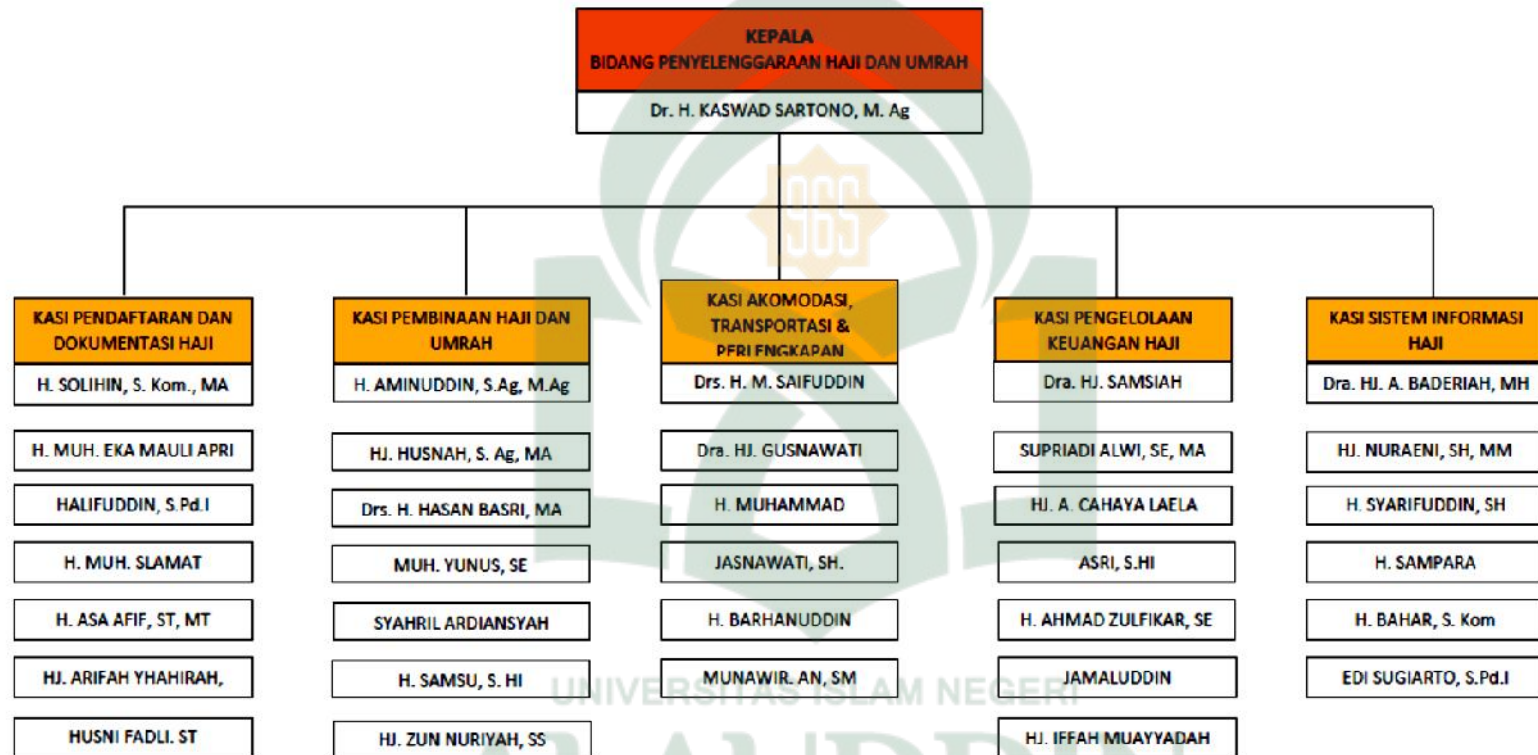


**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (Olah data 2017)

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (Olah data 2017)

2. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan

- a. Melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan dan capaian Humas Kanwil Kemenag Sulsel:
 - 1) Mengelola Majalah Kantor Wilayah dan penerbitan berkala lainnya
 - 2) Menyelenggarakan konferensi pers, temu wicara dengan insan media dan membuat siaran pers (*press release*) serta mengirimkannya kepada redaksi media massa lokal maupun nasional
 - 3) Mengelola dokumentasi dalam bentuk foto, video, audio maupun lainnya
 - 4) Melakukan pemantauan dan analisis terhadap pemberitaan terkait Kementerian Agama, termasuk pembuatan klipping berita
 - 5) Menjadi penghubung dengan media dan menjadi juru bicara Kanwil Kementerian Agama
 - 6) Mengelola publikasi media dalam ruang seperti *standing banner* dan media luar ruang seperti baliho, spanduk dan lainnya
- b. Memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lintas bidang/unit kerja di tingkat provinsi
 - 2) Mengelola unit pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID Unit Kanwil)
 - 3) Mengelola pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Agensi dan Sub Agensi LPSE)
 - 4) Membantu pelaporan pelaksanaan anggaran secara elektronik (e-MPA)
 - 5) Menyiapkan rohaniawan yang diperlukan oleh instansi lain untuk keperluan pengambilan sumpah jabatan

- c. Mengelolah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Kanwil, meliputi *Website*, jaringan *Virtual Private Network Internet Protocol* (VPN-IP), *Local Area Network* (LAN), telepon berbasis internet, *video conference*, layanan e-mail resmi Kementerian Agama dan layanan lainnya yang berbasis TIK.
- d. Menjadi penghubung dengan instansi/lembaga lain terutama DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan instansi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan Kementerian Agama di tingkat Provinsi.
- e. Memberi bimbingan teknis tentang kehumasan, data dan TIK kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri pada bidang kehumasan, data, dan TIK
- g. Melakukan kordinasi tentang kebijakan, program dan kegiatan kehumasan, data, dan TIK kepada pusat informasi dan humas atau unit kerja lainnya yang terkait di Kementerian Agama Pusat.

B. Relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan Media Lokal terkait Publikasi Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016

Dalam sub pembahasan ini akan diuraikan temuan data lapangan (*field research*) yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan yang berkompeten di bidangnya, antara lain Kepala Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat, Bagian Pers dan Berita, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, dan informan representasi dari pihak media penyiaran TVRI dan media penerbitan harian/*online* Rakyat Sulsel. Hasil observasi dan wawancara tersebut direduksi dan dikategorisasi sesuai relevansi fokus masalah penelitian yang dibagi ke dalam beberapa sub bagian pembahasan, antara lain peran Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, aktivitas publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016, dan pola *Media Relations* Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan Media Lokal.

1. Peran Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berdasarkan temuan data observasi dan wawancara, diketahui bahwa pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat bagian struktural yang berperan di bidang pelayanan, pengelolaan, dan publikasi informasi, yakni Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas). Sub Bagian Informasi dan Humas memiliki fungsi yang sama seperti Humas pemerintahan lainnya, yakni menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi dan hubungan masyarakat (PMA No.13 Tahun 2012). Hal ini dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain yang menyatakan bahwa:

Jadi humas itu kita mengelola informasi dan publikasi yang terkait dengan seluruh program kegiatan Kemenag khusus di Sulawesi Selatan, baik itu dalam bentuk pameran, publikasi maupun kegiatan lain intinya publikasi ini adalah bagaimana kita memberi informasi kepada masyarakat tentang seluruh kegiatan kementerian agama dan apa apa saja yang akan dilakukan setiap tahunnya (Wawancara, 19 Juni 2017)

Keterangan informan di atas menegaskan bahwa Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas yang signifikan menyangkut tata kelola informasi dan publikasi informasi. Sedangkan inti dari tujuan publikasi informasi yang dilakukan oleh Humas Kanwil Kementerian adalah memberikan layanan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan jajaran Kementerian Agama di wilayah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan adanya jaminan hak bagi warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi secara garis besar menyebutkan dua tugas dan fungsi utama Humas Kanwil Kemenag Sulsel terkait pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik, sebagai berikut:

- a. Melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan dan capaian Humas Kanwil Kemenag Sulsel.
- b. Memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat

Uraian tugas dan fungsi praktisi Humas Kanwil Kemenag Sulsel pada dasarnya menyerupai kegiatan wartawan media yang juga melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi informasi atau berita. Namun konten yang diliput dan dipublikasi oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel lebih spesifik pada

program, kegiatan Kanwil Kemenag Sulsel. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah termasuk salah satu program yang harus dipublikasikan oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel. Dalam hal ini, informan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kaswad Sartono, mengemukakan tentang adanya kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulsel terkait tata kelola informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kebijakan teknis penyelenggara Haji sebenarnya sifatnya sentralistik karena kita ini vertikal tetapi dalam rangka pengembangan di Kementerian Agama ada yang sifatnya teknis, yang terkait sistem informasi yaitu meningkatkan kualitas SDM, pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan yang terakhir ekselerasi input data. Harus didukung oleh kordinasi dengan *stakeholder* (Wawancara, 19 Juni 2017)

Berdasarkan keterangan informan tersebut, maka diketahui bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dikendalikan secara terpusat oleh Kementerian Agama RI, meskipun terdapat jajaran instansi Kementerian Agama di setiap daerah namun koordinasinya tetap dilakukan secara vertikal. Hal ini sejalan dengan ketentuan PMA No.13 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa instansi vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, baik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Khususnya pada Kanwil Kemenag Sulsel, Sub Bagian Informasi dan Humas adalah elemen struktural yang paling berwenang dalam urusan publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah juga tidak dapat diabaikan perannya, sebab bidang inilah yang menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Provinsi. Sedangkan peran Sub Bagian Informasi dan Humas hanya pada konteks pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi utamanya publikasi informasi. Karena itu, kedua elemen ini saling berkoordinasi dalam melaksanakan

tugasnya. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kaswad Sartono, menyatakan bentuk koordinasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Sub Bagian Informasi dan Humas:

Humas dalam struktur penyelenggaraan Haji itu adalah bagian dari *stakeholder* yang lain, tentu kerjasama kordinasi bahkan integrasi karena humas itu internal jadi seluruh yang terkait informasi Haji itu sebenarnya juga tugas humas, jadi humas itu diharapkan menjemput bola karena itu bagian tugas pokoknya (Wawancara, 19 Juni 2017)

Peranan penting lainnya yang dilaksanakan oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel adalah mengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Kanwil Kemenag Sulsel, meliputi *Website*, jaringan *Virtual Private Network Internet Protocol* (VPN-IP), *Local Area Network* (LAN), telepon berbasis internet, *video conference*, layanan *e-mail* resmi Kementerian Agama dan layanan lainnya yang berbasis TIK. Dalam kaitan ini, Kanwil Kemenag Sulsel telah memiliki *Website* (<http://sulsel.kemenag.go.id>), tetapi konten penyelenggaraan ibadah Haji dalam *Website* ini juga masih dikelola secara terpusat yang menyajikan “Basis Data” meliputi daftar tunggu (*waiting list*), penyelenggaraan umrah, perkiraan keberangkatan dan operasionalisasi haji. Dari *Website* inilah masyarakat dapat mengakses data informasi Haji, baik jumlah pendaftar calon jamaah Haji dan jamaah Haji yang telah diberangkatkan oleh Kementerian Agama RI.

2. Media dan Aktivitas Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam Proses Publikasi Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2016

Media yang dimaksud dalam bahasan ini adalah media yang digunakan oleh Kanwil Kemenag Sulsel yang menjadi sarana untuk mempublikasikan berbagai informasi program Kementerian Agama khususnya penyelenggaraan Ibadah Haji. Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain, secara garis besar menguraikan dua kategori media yang digunakan oleh Sub Bagian Informasi dan Humas untuk tujuan publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji periode 2016:

Pada jenis media internal Humas Kanwil Kemenag Sulsel, ada media cetak dalam hal ini adalah majalah dan secara *online* kami memiliki *Website*. Sedangkan jenis media eksternal kami lakukan kerjasama dengan media elektronik, cetak dan *online* (Wawancara, 6 Juli 2017)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selain membangun relasi dengan media massa (cetak, elektronik, *online*), Humas Kanwil Kemenag Sulsel juga memiliki media internal untuk mempublikasikan program kegiatan Kementerian Agama terutama informasi penyelenggaraan ibadah Haji. Media internal tersebut berupa majalah yang diterbitkan secara berkala, dan media *online* atau *Website* sebagai sarana untuk menginformasikan seluruh informasi baik aspek kebijakan, peraturan-peraturan, maupun agenda-agenda program Kementerian Agama. Dalam hal ini Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain, mengemukakan:

Kita mengelola informasi sekarang sudah menuju era IT dimana kita juga mampu memiliki *Website* yang notabennya itu servernya semua ada di pusat jadi kita memiliki server sendiri tanpa harus menumpang kepada server lain (Wawancara, 6 Juli 2017)

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan informasi tentang program Kementerian Agama, sudah diterapkan infrastruktur berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya pengadaan *Website* dengan sistem pengelolaan secara terpusat, dalam arti semua *Website* yang dimiliki oleh setiap instansi vertikal Kementerian Agama di daerah terintegrasi dengan server yang ada di pusat. Sistem pengelolaan secara terpusat ini dimungkinkan sebab kewenangan urusan pemerintahan yang absolut, khususnya bidang agama memang harus dikendalikan oleh pemerintah pusat (Kementerian Agama RI), sehingga tidak semua wewenang dilimpahkan kepada instansi vertikal Kementerian Agama di daerah.

Demikian halnya mengenai kebijakan publikasi informasi keagamaan, pada aspek tertentu Humas Kanwil Kemenag Sulsel hanya mengelola sebagian

informasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah tampilan *Website* yang dimiliki Humas Kanwil Kemenag Sulsel:

Gambar 4.3 Website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel



Sumber: website resmi Kanwil Kemenag Sulsel, <http://sulsel.kemenag.go.id>

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa *Website* di atas tidak menyediakan secara lengkap mengenai informasi penyelenggaraan Ibadah Haji, hanya ada satu konten (*menu bar Website*) yang spesifik menyampaikan info penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu “Layanan Publik” yang berisi informasi; (1) Proses Pembatalan Haji ke Depan, dan (2) Jadwal Pemberangkatan/Pemulangan Haji Embarkasi Debarkasi Makassar. Temuan data observasi dan pernyataan informan yang telah dipaparkan sebelumnya, membuktikan bahwa pengelolaan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terpusat sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama, bahwa informasi penyelenggaraan Ibadah Haji di bawah kendali Bagian Sistem Informasi Haji

Terpadu sebagai Unit PPID pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Dalam rangka megantisipasi kelemahan sistem pengelolaan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji, maka pada Tahun 1992 Kementerian Agama menerapkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Siskohat ini dibuat untuk memudahkan Kementerian Agama menyelenggarakan pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, Siskohat ini pun telah mengalami pemutakhiran sistem, yang disebut Siskohat Generasi 2 (Siskohat Gen-2) pada Tahun 2014 yang lalu, sebagai perbaikan dari Siskohat Gen-1. Berikut adalah tampilan Siskohat dalam *Website* Kementerian Agama RI yang dapat diakses oleh publik:

Gambar 4.4 Siskohat dalam *Website* Kementerian Agama RI

Nama Prov/Kab/Kota	Kuota	(s.d Tahun)	Pendaftaran Akhir	Pendaftaran	Lunas Tanda
ACEH	4350	2038	1'00' 47'23	89543 Jemaah	131 Jemaah
SUMATERA UTARA	8282	2031	20022' 277	100725 Jemaah	110 Jemaah
SUMATERA BARAT	4587	2033	300' 32'13	70712 Jemaah	131 Jemaah
BATAK	3403	2033	400' 50' 42	78110 Jemaah	138 Jemaah
JAWA BARU	2980	2036	500092036	54970 Jemaah	50 Jemaah
SUMATERA SELATAN	8985	2031	800' 8' 250	94118 Jemaah	155 Jemaah
LAMPUNG	7024	2031	900' 75' 14	80211 Jemaah	187 Jemaah
DIYAKARTA	7051	2033	90004' 814	175140 Jemaah	225 Jemaah
JAWA TENGAH	30225	2036	1'100055454	866843 Jemaah	686 Jemaah
DIYOGYAKARTA	3132	2037	1'200' 02'775	62047 Jemaah	33 Jemaah
JAWA TIMUR	10481	2038	1'30' 11' 27	719811 Jemaah	1873 Jemaah
BALI	895	2034	1'4000' 83'18	1'537 Jemaah	21 Jemaah

Sumber: website resmi Kementerian Agama RI, <http://haji.kemenag.go.id>

Jika dicermati, Siskohat pada *Website* tersebut di atas menguraikan secara menyeluruh tentang informasi penyelenggaraan Ibadah Haji, baik yang telah

terselenggara pada tahun sebelumnya maupun tahap-tahap penyelenggaraan Ibadah Haji untuk tahun berikutnya. Adapun informasi penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan konsep Siskohat secara detail telah diuraikan dalam bentuk konten (*menu bar*) *Website* tersebut, antara lain:

- a. Regulasi; berisi peraturan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai dari Undang-Undang, Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden (Perpres), Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Bersama, Keputusan Dirjen, *Taklimatu Hajj* Saudi Arabia
- b. Publikasi; antara lain berita, artikel, media center haji, pengumuman, data-data
- c. Basis Data; berisi *waiting list*, penyelenggaraan umrah, operasional haji, operasional kesehatan
- d. Multimedia; antara lain *photo galery*, audio dan visual
- e. Ragam; berisi daftar istilah, pertanyaan publik, dan link terkait
- f. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); berisi layanan informasi publik, profil PPID Kemenag, SOP layanan PPID, daftar informasi publik, laporan keuangan, dan informasi program
- g. Museum Haji dan *Blog*

Berdasarkan keterangan Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain, mengemukakan beberapa fungsi dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebagai berikut:

Fungsi Siskohat itu untuk meng-*entry data* pendaftaran haji, pembuatan dokumen haji, akuntansi BPIH, *database* transportasi haji, *database* penempatan pemondokan jemaah, informasi publik, sistem informasi kesehatan haji, dan *database* petugas haji. Masyarakat lebih mudah kalau mengecek daftar tunggu haji, tidak lagi harus datang ke kantor Kemenag atau kantor penyelenggara haji. Cukup kita membuka situs informasi keberangkatan haji, calon jemaah bisa melihat namanya di urutan ke berapa dari daftar tunggu keberangkatan (Wawancara, 6 Juli 2017)

Selanjutnya Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kaswad Sartono, mengemukakan beberapa kemudahan yang dapat dirasakan oleh publik terutama calon jemaah Haji dengan adanya sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (Siskohat) antara lain:

- a. Secara *real-time* dapat langsung dihitung jumlah setoran BPIH
- b. Pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun atau *nonstop*
- c. Menyimpan *database* lengkap seluruh jemaah haji secara terstruktur
- d. Kemudahan dan kecepatan layanan informasi tentang posisi dan status jemaah haji kepada publik, sejak masa pendaftaran sampai masa pemberangkatan, operasional di Arab Saudi hingga kepulangan kembali ke daerah asal.

Siskohat diharapkan mampu menjawab kebutuhan data yang bisa diakses secara cepat dan akurat, serta berfungsi sebagai interaksi dua arah untuk pelayanan publik dan lembaga terkait. Siskohat juga berarti keterbukaan informasi dengan penyediaan akses untuk memberitahu tahun rencana keberangkatan haji melalui nomor porsi yang diperoleh setelah pembayaran setoran BPIH. Nomor porsi ini secara otomatis tersimpan di *database* sehingga bisa diakses kapan saja melalui *Website* <http://haji.kemenag.go.id>. Nomor porsi ini menjadi *waiting list*/daftar tunggu yang menjadi acuan rencana keberangkatan haji termasuk kapan pelunasan dan kapan keberangkatannya. Dengan adanya *database* Siskohat (Gen-2) nantinya pemerintah sebagai penyelenggara resmi ibadah haji dapat menerbitkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) bagi jemaah yang dokumen hajinya telah lengkap, pengelompokan kloter, standar pelayanan yang didapatkan sebelum penerbangan, dan lain-lain. Semua pelayanan ini dapat diberikan secara *realtime* tanpa bolak-balik menanyakan ke kantor Kemenag Kabupaten/kota setempat. Berikut adalah gambaran umum Siskohat Generasi Kedua (Gen-2) yang dikonstruksi oleh Kementerian Agama RI:

Gambar 4.5 Alur Siskohat Generasi Kedua (Gen 2)



Sumber: <https://www.hajikita.com>

Berkenaan dengan aktivitas Humas Kanwil Kemenag Sulsel yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016, menurut keterangan informan dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagaimana Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/4044/2013 Tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Subbagian Informasi dan Humas, yang telah diuraikan pada sub pembahasan terdahulu. Dalam kaitan ini, informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi, mengatakan bahwa Humas Kanwil Kemenag Sul-Sel telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berbagai kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik khususnya dengan mengintensifkan publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016.

Kalau selama ini hampir semua tahapan pelaksanaan haji tahun 2016 itu kita informasikan ke publik, mulai dari proses pendaftaran, pelunasan, manasik, jadwal, informasi tentang kloter, jadwal embarkasi dan debarkasi itu semua kita sampaikan ke media, bahkan momen-momen tertentu kita libatkan teman-teman media, misalnya seperti apel siaga persiapan penyelenggaraan haji itu kita undang mereka termasuk ketika rapat penentuan kloter kita undang juga mereka supaya mereka cepat bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa kabupaten ini kloter ini tanggal sekian berangkatnya tanggal sekian pulang, ini sudah selesai dan ini juga intens kami lakukan (Wawancara, 3 Juli 2017)

Dengan demikian Humas Kanwil Kemenag Sul-Sel sejauh ini telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik, khususnya publikasi informasi pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2016. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain, bahwa Humas Kanwil Kemenag Sul-Sel membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *Website*, publikasi majalah, dan kadang dalam bentuk baliho, spanduk dan semua media yang dapat diakses atau bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi, juga menguraikan tentang sejauhmana tanggapan masyarakat terkait layanan informasi

publik oleh Humas Kanwil Kemenag Prov.Sul-Sel tentang penyelenggaraan Ibadah Haji periode 2016:

Sangat lumayan bagus karena menurut KPIH itu menilai bahwa embarkasi debarkasi Makassar itu adalah penyelenggaraan Haji terbaik di Indonesia tahun 2016 dan saya yakin tidak terlepas juga karena peran informasi dan publikasi di dalamnya. Kenapa kami menganggap ini tanggapan masyarakat sangat lumayan, karena respon cepat media memberitakan segala perkembangan di dalam kadang detik perdetik menit permenit jam perjam itu diberitakan akan keluar itu kemudian membuat masyarakat kita yang haus utamanya keluarga jamaah Haji yang haus akan informasi mengenai perHajian itu langsung terpuaskan dahaganya dengan adanya informasi yang bersweleran, makanya kami sangat minta dan berharap teman teman media itu sebisa mungkin mengkonfirmasi ke kami baik berita positif ataupun negatif supaya bisa langsung bagi *share to share* ke person atau institusi ke institusi supaya ini terbagi rata ke masyarakat (Wawancara, 3 Juli 2017)

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Humas Kanwil Kemenag Sulsel memiliki media internal yang digunakan untuk tujuan publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Media internal tersebut berupa Majalah dan media *online* (*Website*) dimana situs ini menyediakan info yang terbatas seputar penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu pada konten “Layanan Publik” yang berisi informasi proses pembatalan Haji ke pepan, dan jadwal pemberangkatan/pemulangan Haji. Karena sifat organisasi Kementerian Agama yang vertikal, maka informasi penyelenggaraan Ibadah Haji juga dikendalikan secara terpusat melalui situs <http://haji.kemenag.go.id> sebagai perwujudan dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Sementara itu, aktivitas Humas Kanwil Kemenag Sulsel yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016, telah dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik khususnya pada dua aspek, yaitu (a) melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan dan capaian Humas Kanwil Kemenag Sulsel, dan (b) memberikan pelayanan data, informasi dan

layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat.

3. Relasi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan Media Massa Penyiaran dan Penerbitan

Secara konseptual Hubungan Masyarakat (Humas) di lingkungan instansi pemerintah adalah lembaga atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah (E. Mangindaan, 2011:7). Demikian halnya Kementerian Agama sebagai instansi pemerintahan memiliki lembaga/praktisi Humas yang berperan melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi dengan sasaran menciptakan hubungan (*relation*) baik dengan *internal public* maupun *external public*.

Pada aspek hubungan ke luar (*external public relation*) inilah dapat ditinjau bagaimana relasi Humas Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan dengan publik dan lembaga-lembaga lainnya yang bersangkutan paut dengan program kerja Kementerian Agama. Pada kenyataannya, Humas Kemenag Sulsel memiliki banyak relasi dengan lembaga lain seperti yang diungkapkan oleh informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi:

Yang pertama itu hampir setiap ada *event* Haji tiap tahun itu Sub Bagian Humas pasti dilibatkan dalam PPIH baik debarkasi maupun embarkasi. Fungsi kami di sini adalah menghimpun data data, kemudian mengkomunikasikan data-data tersebut dengan pihak-pihak yang terkait karena di PPIH itu bukan hanya Kementerian Agama di sana ada Kepolisian, Kesehatan, Beacukai, Imigrasi, Otoritas Bandara dan banyak lagi. Jadi mengkomunikasikan data dan informasi yang ada (Wawancara, 3 Juli 2017)

Namun demikian, media massa adalah salah satu lembaga yang erat hubungannya dengan kinerja Humas Kemenag Sulsel, khususnya dalam konteks publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Praktisi Humas Kanwil

Kemenag Sulsel tentunya membutuhkan peran media untuk mempublikasikan seluruh informasi menyangkut penyelenggaraan Ibadah Haji kepada publik. Hal ini terindikasi dalam pernyataan informan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kaswad Sartono, yang menyatakan bentuk koordinasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel dengan lembaga Pers/Media Massa lokal.

... kalau terkait dengan media massa itu kita bikin kerjasama baik secara langsung ataupun tidak langsung jadi hampir semua lah, kita tidak pernah menolak ketika ada permintaan dari media bahkan kita ini terimakasih ketika kita ini diminta berarti kita ini dibutuhkan, Haji ini kan melayani masyarakat kalau melalui media massa kan jangkauannya luas, pandangan saya keberadaan media itu sangat vital dan strategis (Wawancara, 19 Juni 2017).

Humas Kanwil Kemenag Sulsel menyediakan informasi dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada media lokal apabila diminta, sebaliknya pihak media lokal merekonstruksi sekaligus menyiarkan berita agar publik dapat mengetahui informasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam upaya membina *media relations*, Humas Kanwil Kemenag Sulsel melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan media lokal di Sulawesi Selatan, dua diantaranya adalah media penyiaran TVRI dan media penerbitan/*online* Harian Rakyat Sulsel. Dalam hal ini, Humas Kanwil Kemenag Sulsel mengakomodasi kebutuhan informasi media lokal tersebut dengan cara menyiapkan media center di Asrama Haji untuk memudahkan wartawan media yang ingin melakukan peliputan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi:

Media cetak, media elektronik dan media *online* yang intens, berkomunikasi mengikuti perkembangan penyelenggaraan Haji setiap tahun, olehnya itu kami sebagai yang dilibatkan dalam PPIH itu biasa menyiapkan media center di asrama Haji, jadi media center itu fungsinya sebagai pusat beredarnya informasi pemberitaan publikasi tentang Haji, yang kedua media center ini juga dijadikan tempat bagi teman teman media sebagai tempat *stand by* mengolah meramu berita mereka dan sekaligus sebagai tempat istirahat bagi teman teman media karena PPIH ini kan kadang ada pemberangkatannya pagi kadang tengah malam maupun subuh (Wawancara, 3 Juli 2017)

Keterangan informan tersebut tampak sejalan dengan pandangan Philip Lesly yang menyatakan bahwa *media relations* adalah hubungan dengan media untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi, yakni berupa manfaat publisitas. Karena itu, kegiatan Humas Kanwil Kemenag Sulsel yang menyediakan media center dapat dikatakan menopang tujuan publisitas atau sebagai bentuk respon Humas Kanwil Kemenag Sulsel terhadap kepentingan media. Dalam praktiknya, meskipun Humas Kanwil Kemenag Sulsel tidak melakukan upaya koordinasi, wartawan media lokal sendiri telah memahami temporal waktu rutinitas kegiatan Kementerian Agama untuk dijadikan bahan liputan berita. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain:

... terkait dengan kegiatan Haji tahun 2016, jauh pada tahun-tahun sebelumnya kita selalu melakukan kordinasi, menyampaikan kepada media untuk meliput seluruh kegiatan Haji. Karena Haji adalah satu kegiatan yang sifatnya nasional dan itu serentak seluruh Indonesia, setelah itu kita hanya memberikan saja bahan pada saat di lapangan secara otomatis mereka (media) sudah memahami tanpa harus lagi melakukan permintaan kepada media karena mereka sudah menyatu dan memahami bahwa Haji itu sifatnya nasional, jadi dia berjalan secara otomatis (Wawancara, 6 Juli 2017)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *media realtions* dalam konteks ini lebih dominan menunjukkan model komunikasi dua arah (*two way symmetric*), dimana posisi Humas Kanwil Kemenag Sulsel tidak hanya sebagai fasilitator atau narasumber informasi penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai sumber berita bagi media tersebut, tetapi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam menjalankan tugasnya juga membutuhkan media massa untuk menyampaikan pesan atau informasi penyelenggaraan Ibadah Haji kepada masyarakat (publik). Hal ini tercermin dalam pernyataan informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi:

... kita membangun komunikasi yang intens dengan teman teman dari media, apakah media membutuhkan kami sebagai fasilitator ke narasumber atau membutuhkan informasi langsung dari kami itu tugas kita di sana. Terakhir yaitu bagaimana membantu membuat suasana embarkasi dan debarkasi ini berjalan sukses dan lancar jadi tidak cuman berkutat di masalah informasi tetapi sebagai panitia PPIH juga membantu kelancaran penyelenggaraan Haji yang ada di sana (Wawancara, 3 Juli 2017).

Dalam perspektif *media relation*, dinyatakan bahwa Humas lebih berperan sebagai mediator antara organisasi dan publik. Karena kepentingan ini, maka hubungan yang terjadi antara Humas dengan media massa pada model *two-way symmetric* adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menguntungkan untuk mendukung pekerjaan masing-masing. Model komunikasi ini mempunyai tujuan untuk membentuk keadaan yang saling memahami antara *public relations* dan media massa.

Adapun manfaat yang diperoleh Humas Kanwil Kemenag Sul-Sel dari hubungan yang terjalin dengan media massa lokal, dikemukakan oleh informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi:

Sangat banyak, yang pertama itu secara otomatis disengaja atau tidak disengaja disadari atau tidak disadari diminta atau tidak diminta mereka sudah sangat membantu kami dari pihak Kementerian Agama untuk mempublikasikan program dan kegiatan kami itu secara tidak langsung, yang kedua minimal apa yang dikerjakan oleh Kementerian Agama itu bisa diketahui oleh seluruh publik melalui media media yang ada kalau mungkin selama ini media internal kami terbatas hanya media *online* (*Website*) dan media cetak (majalah) mungkin pembacanya atau pengunjungnya itu masih terbatas di kelas kelas tertentu atau mungkin komunitas komunitas tertentu tapi kalau dibantu lagi dengan teman teman media baik cetak, elektronik atau *online* di luar dari kementerian agama itu justru lebih bagus, lebih membantu mempublikasikan mensosialisasikan program Kementerian Agama ke masyarakat (Wawancara, 3 Juli 2017).

Keterangan informan tersebut menunjukkan manfaat signifikan dari *media realtions* yang dibangun oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media massa lolal. Salah satu manfaat yang dimaksud adalah untuk memenuhi aspek pelayanan informasi publik sebagai tugas dan fungsi utama Humas Kanwil Kemenag Sulsel. Pelayanan informasi publik tentunya akan berjalan efektif jika Humas Kanwil Kemenag Sulsel melibatkan peran media massa untuk

mempublikasikan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Humas Kanwil Kemenag Sulsel menyadari bahwa publikasi informasi tidak cukup hanya mengandalkan media internal seperti Majalah dan *Website* berbasis Siskohat yang kurang menjangkau seluruh segmen khalayak, karena itu dengan melibatkan media lokal diasumsikan dapat menunjang proses diseminasi informasi program Kementerian Agama ke masyarakat terutama penyelenggaraan Ibadah Haji.

Publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji periode 2016 melalui media massa lokal dianggap efektif bahkan dapat menjadi indikator untuk menilai sejauhmana kinerja Humas Kanwil Kemenag Sulsel. Sebab media juga memiliki peranan sebagai perantara komunikasi untuk menyalurkan respon (*feedback*) masyarakat atas kinerja Kementerian Agama sebagaimana pernyataan Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain:

Sangat efektif karena kita sekarang itu tidak bisa bekerja tanpa media karena media ini juga merupakan barometer kita untuk mengetahui tingkat sejauh mana kinerja kita sejauh ini apakah nanti ada tanggapan dari masyarakat bahwa ini yang kurang (Wawancara, 6 Juli 2017).

Bagian Pers dan Berita, Mawardi juga menyatakan bahwa publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji periode 2016 melalui media massa lokal dianggap efektif:

Sangat efektif, dari angka 1 sampai 100 itu efektivitasnya saya bisa katakan 90% lebih lah sangat membantu, olehnya itu kita disini teman teman yang ada di humas dan kontributor kontributor humas di daerah memang kami sarankan bahkan kami minta ketika ada rilis berita itu harus langsung di lempar ke media eksternal baik berupa *release* maupun berita foto, bahkan kita tambah lagi bahwa jangan cuman di lempar ke media tetapi lempar juga ke media sosial karena jangkauan media sosial biasanya jauh lebih luas (Wawancara, 3 Juli 2017).

Senada dengan keterangan dari kedua informan tersebut, informan dari pihak media penyiaran dan penerbitan (TVRI dan Rakyat Sulsel) memberikan respon yang sejalan dengan keterangan Humas Kanwil Kemenag, bahwa media

memiliki peran yang signifikan dalam proses pelayanan informasi publik khususnya informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kalau keterbukaan informasi publik pastinya kita dari media yang sifatnya independen jadi terbuka untuk informasi publik mengenai apa yang sedang terjadi disana terutama dalam hal ibadah haji, kita sebagai media partner juga menyampaikan bagaimana situasi perkembangan haji kepada Kementerian Agama dan kami juga bersyukur karena mereka juga terbuka seperti kegiatan kegiatan yang mereka laksanakan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi yang terjadi dalam konteks *media realtions* antara Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media massa lokal, mencakup tiga (3) aspek yaitu, *Public Information*, *Two-way Asymmetric* dan *Two-way Symmetric*.

1. *Public Information*

Humas Kanwil Kemenag Sulsel menjalankan fungsinya untuk meliput, melaporkan, menyusun *release* kemudian dipublikasi melalui *Website* dan juga ditransfer ke media baik secara personal maupun ke email media langsung. Menurut Humas Kanwil Kemenag Sulsel, hal ini biasanya dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui media sosial *WhatsApp*, bahkan Humas Kanwil Kemenag Sulsel juga mempunyai *group* tersendiri untuk wartawan media yang khusus meliput persoalan keagamaan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan pihak media penyiaran TVRI maupun media penerbitan/*online* Rakyat Sulsel, menyatakan bahwa Humas Kanwil Kemenag Sulsel dipandang sebagai mitra dalam penyediaan informasi kepada publik. Hubungan sebagai *public information* ini terjadi karena media bekerjasama dengan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, baik dalam mempublikasikan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji maupun informasi lainnya.

2. *Two-way Asymmetric*

Dalam konteks ini komunikasi juga dilakukan oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel seperti konferensi pers, jadi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan pejabat yang memiliki agenda penting berharap informasinya dipublikasikan dengan mengundang wartawan media untuk *press conference*. Selain itu, Humas Kanwil Kemenag Sulsel menggunakan *social media*, biasanya ketika ada kegiatan penting maka Humas Kanwil Kemenag Sulsel berkomunikasi melalui *Whatsapp* untuk kemudian diinformasikan kepada media, lalu media tersebut merespon informasi untuk datang meliput sebagai bentuk komunikasi dua arah (*two way asymmetric*)

Hal ini sejalan dengan keterangan informan dari pihak media penyiaran TVRI dan media penerbitan/*online* Rakyat Sulsel, bahwa *two way asymmetric* terjadi ketika pihak Humas Kanwil Kemenag Sulsel mengadakan konferensi pers. Selain itu, jika ada kegiatan lain yang penting dan untuk dipublikasikan maka pihak Humas Kanwil Kemenag Sulsel mengundang wartawan TVRI dan Rakyat Sulsel, dan sebaliknya Humas Kanwil Kemenag Sulsel juga merespon dengan menghadiri undangan dari kedua media ini.

3. *Two-way Symmetric*

Menurut praktisi Humas Kanwil Kemenag Sulsel, aspek ini secara otomatis akan terjalin, ketika kedua model komunikasi yang di atas terjadi. Baik Humas Kanwil Kemenag Sulsel maupun media sesungguhnya sama-sama membutuhkan informasi. Humas Kanwil Kemenag Sulsel juga membutuhkan konfirmasi dari media tentang informasi di luar, apakah itu baik atau buruk tentang Kementerian Agama. Karena itu dengan komunikasi yang terbangun, pihak media biasanya mengkonfirmasi ke Humas Kanwil Kemenag Sulsel soal

kebenaran suatu informasi, untuk menghindari adanya informasi atau berita yang sudah terlanjur publikasi tanpa melalui konfirmasi merusak citra kelembagaan.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Media Relations Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam Publikasi Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Fokus kedua pada sub pembahasan ini adalah tentang faktor penghambat dan pendukung *media realtions* Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media lokal dalam proses publikasi pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2016. Pembahasan ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan menghambat *media realtions* Humas Kanwil Kemenag Sulsel.

1. Faktor Internal

Berdasarkan temuan data observasi dan wawancara, diketahui beberapa aspek yang menunjang kinerja Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam proses publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016. Salah satu di antaranya adalah aspek regulasi internal Kementerian Agama RI, dimana pada tahun 2013 telah ditetapkan aturan tentang Tugas dan Fungsi Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kanwil Kemenag Sulsel, yaitu:

- a. Melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan dan capaian Humas Kanwil Kemenag Sulsel
- b. Memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya penegasan batas-batas wewenang dalam peran, tugas dan fungsi Sub Bagian Informasi dan Humas sebagai Unit PPID di lingkungan Kanwil Kemenag Sulsel. Secara vertikal, pengelolaan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji sifatnya terpusat di bawah kendali Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu – Unit PPID Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (KMA No.200 Tahun 2012. Karena itu, Sub

Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Keberadaan media internal Kementerian Agama, baik majalah (media cetak) maupun *Website* (media *online*) juga menjadi faktor penting yang sangat mendukung kinerja Humas Kanwil Kemenag Sulsel. Dalam hal ini rancang bangun *Website* Kementerian Agama RI terintegrasi dengan *Website* seluruh Kanwil Kemenag di setiap Provinsi sehingga mendukung proses koordinasi secara vertikal oleh Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel kepada Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu PPID Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Meskipun *Website* Kanwil Kemenag Sulsel tidak menyediakan secara lengkap informasi penyelenggaraan Ibadah Haji, tetapi Kementerian Agama pusat telah membuat secara khusus *Website* untuk pengembangan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Menurut data yang diperoleh dari Kanwil Kemenag Sulsel, Siskohat telah dimutakhirkan melalui Siskohat Generasi kedua (Gen-2) yang mendukung sistem *e-hajj* (*electronic hajj*). Masalah yang muncul pada Siskohat Gen-2 hanya belum maksimal pelaksanaannya karena menu untuk mengetahui data jamaah haji yang digunakan pada Siskohat Gen-1 tidak dimunculkan pada Siskohat Gen-2. Meskipun terdapat masalah, *Website* berbasis Siskohat tersebut setidaknya menjadi sarana internal Kementerian Agama untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi oleh pejabat PPID Kementerian Agama.

Selain itu, *Website* berbasis Siskohat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik yang merupakan tugas dan fungsi Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, khususnya melayani masyarakat terhadap akses informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Keberadaan *Website*-Siskohat ini sekaligus menjadi solusi atas kelemahan media internal produk Kanwil Kemenag Sulsel yang selama hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja dan kurang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun faktor penghambat internal bagi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam konteks pelayanan dan pengelolaan informasi penyelenggaraan ibadah Haji, antara lain adalah persoalan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Khususnya pada kegiatan *media relations* antara Humas Kanwil Kemenag Provinsi dengan Humas Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota, terjadi kendala karena kekurangan anggaran operasional untuk kegiatan Jurnalistik dan anggaran untuk mengakomodasi kontributor Humas di daerah. Hal ini dikemukakan oleh Bagian Pers dan Berita, Mawardi:

Pertama faktor anggaran, kita juga tidak bisa terlalu ngotot, kita hanya setiap tahun mengusulkan. Jadi kita sangat berharap anggaran kegiatan kehumasan itu seperti tahun tahun sebelumnya ada untuk orientasi jurnalistik, orientasi kehumasan yang kita peruntukkan untuk teman teman kontributor humas yang ada di setiap daerah, biasa itu ada tiga sampai empat angkatan kita lakukan disamping itu penyegaran untuk peningkatan SDM juga untuk perekrutan tenaga baru.

Hambatan terjadi dalam hal ini dikarenakan Humas Kanwil Kemenag Sulsel memang tidak hanya memfasilitasi unit kerjanya; Bagian Pers dan Berita, Pengelola *Website*, Pengelola LPSE, Pengelola Data, dan Pewarta Foto, melainkan Humas Kanwil Kemenag Sulsel juga turut memfasilitasi Humas Kemenag Kabupaten/Kota dan beberapa program kegiatan kehumasan yang memiliki kaitan dengan hubungan antar lembaga dan juga media lokal. Pada kenyataannya, Humas Kanwil Kemenag Sulsel harus menyediakan segala macam kebutuhan berhubungan dengan media, baik bahan pelaksanaan maupun melaksanakan implementasi dari kegiatan dengan media. Selain itu, keterangan informan di atas juga menyinggung adanya upaya peningkatan SDM Humas di lingkungan Kanwil Kemenag Sulsel. Hal ini dimungkinkan karena praktisi Humas

yang profesional memang dituntut memiliki kompetensi komunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan media, minimal memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan seperti jurusan Komunikasi yang diharapkan lebih memudahkan Humas dalam melakukan tugas dan fungsinya.

2. Faktor Eksternal

Faktor pendukung dan penghambat dalam konteks bahasan ini ditinjau pada aspek hubungan ke luar (*external public relation*) yang dibangun oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel, baik relasi dengan media massa lokal maupun relasi dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat mendukung relasi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media lokal, ditentukan oleh sejauhmana sikap masing-masing lembaga ini dalam merespon kebutuhan publikasi informasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bagian Pers dan Berita, Mawardi:

Ini soal relasi dengan media, informasi apapun ketika ada informasi atau berita positif maupun negatif terhadap institusi Kementerian Agama selagi kita menjalankan hubungan yang baik dengan media, baik secara internal media kami dengan eksternal institusi media, baik person maupun lembaganya ketika relasinya saling terbuka maka sebesar apapun hambatan tersebut akan dapat diatasi. Rumusnya seperti ini dalam ilmu PR tidak ada sesuatu masalah atau hambatan yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi.

Salah satu faktor yang menghambat relasi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media, juga terkait persoalan anggaran. Dalam hal ini, informan Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain, menyebutkan bahwa biaya periklanan di media massa membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga Humas Kanwil Kemenag Sulsel hanya mengiklankan program yang diprioritaskan oleh Kementerian Agama dimana informasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat:

Secara eksternal itu dengan media kadang kadang harus kita membuat suatu iklan itu kan harus memerlukan biaya jadi tidak semua juga iklan layanan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu kita sampaikan melalui media cetak ataupun elektronik karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, cuman sama dengan misalnya pemasangan baliho spanduk di jalan-jalan apa segala macam, tidak semuanya tetapi yang kita

utamakan adalah program prioritas dan memang betul betul program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat

Sementara itu, keberadaan media penyiaran publik (TVRI), tidak selalu dapat diartikan dapat menyiarkan kegiatan pemerintahan, misalnya informasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurut keterangan informan dari pihak TVRI, menyatakan bahwa ada aturan main yang harus dilaksanakan oleh TVRI, yaitu kewajiban yang harus diserahkan ke negara. Karena itu, tidak semua hasil liputan harus di publikasi karena terkendala anggaran, meskipun diketahui bahwa ada berita tertentu yang wajib di bayar oleh negara. Dari aspek inilah terjadi hambatan *media relations*, sebab keterbatasan anggaran Humas Kanwil Kemenag Sulsel untuk membiayai publikasi penyelenggaraan Ibadah Haji melalui media. Sedangkan pihak media penyiaran TVRI, hanya menyiarkan berita yang wajib dibayar atau biayanya telah disiapkan, seperti berita pelepasan jamaah haji kloter pertama yang dilepas oleh Gubernur.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh informan Bagian Pers dan Berita, Mawardi, mengungkapkan faktor penghambat dalam proses publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji yang lebih dominan terjadi pasca penyelenggaraan Ibadah Haji, baik berbentuk opini publik maupun dari pihak media itu sendiri.

Untuk sementara kami belum temukan itu karena biasanya peristiwa haji itu khusus untuk embarkasi dan debarkasi kan fokusnya di suatu tempat asrama haji, terkecuali kalau misalnya sebelum atau sesudah pelaksanaan haji kadang ada cerita cerita atau opini masyarakat paling hambatannya ketika sumber informasi tertutup, terkadang juga ada teman teman media yang mengeluh susah mendapatkan informasi karena pihak keluarga tertutup untuk itu.

Berdasarkan keterangan informan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa faktor penghambat tidak hanya pada konteks relasi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media, akan tetapi faktor penghambat juga dilihat dalam perspektif relasi dengan publik/masyarakat. Pada kenyataannya, instrumen pengelolaan dan

publikasi informasi seperti media internal (Majalah dan *Website*) yang dimiliki oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel, dianggap kurang dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh pelosok daerah terutama mereka yang hendak mengakses informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Hal ini terjadi karena, di satu sisi media cetak (Majalah) hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu atau pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Sulsel. Sedangkan keberadaan informasi Siskohat dalam *Website* juga tidak dapat diakses secara merata karena persoalan keterbatasan jaringan internet ke pelosok daerah apalagi kenyataan sebagian masyarakat belum memahami dunia internet. Faktor penghambat pada aspek relasi Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan publik tersebut, terindikasi dalam keterangan informan Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, Ahmad Husain:

Susah mengakses informasi terjadi di daerah-daerah yang pelosok, makanya kita juga kordinasi kepada pak bupati, walikota terutama di kabupaten yang pesisir apa pegunungan itu agak susah mengaksesnya. Sementara kita sampaikan kepada KUA untuk membantu masyarakat yang ada dipelosok yang tidak bisa mengakses informasi apa segala macam

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung *media realtions* Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media lokal dalam proses publikasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016, dapat dilihat pada dua aspek. **Pertama**, secara internal kinerja Humas Kanwil Kemenag Sulsel ditunjang dengan regulasi tentang Tugas dan Fungsi Sub Bagian Informasi dan Humas sebagai Unit PPID di lingkungan Kanwil Kemenag Sulsel. Selain itu, media internal (*Website*) Kementerian Agama juga menjadi faktor penting yang sangat mendukung kinerja Humas Kanwil Kemenag Sulsel. *Website* berbasis Siskohat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik yang merupakan tugas dan fungsi

Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel, khususnya melayani masyarakat terhadap akses informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kedua, secara eksternal yang menjadi faktor penghambat dalam *media realtions* Humas Kanwil Kemenag Sulsel, terjadi pada pada konteks hubungan ke luar (*external public relation*). Relasi dengan media massa lokal terkait persoalan anggaran, dimana biaya periklanan di media massa membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga Humas Kanwil Kemenag Sulsel hanya mengiklankan program yang diprioritaskan oleh Kementerian Agama dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, faktor penghambat juga dilihat dalam perspektif relasi dengan publik, dimana media internal (Majalah dan *Website*) yang dimiliki oleh Humas Kanwil Kemenag Sulsel, dianggap kurang dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh pelosok daerah terutama mereka yang hendak mengakses informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Relasi Humas Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dengan Media Lokal terkait Publikasi Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016

- a. Humas Kanwil Kemenag Sulsel berperan dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi serta memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Humas secara *eksternal* membangun relasi dengan media massa (cetak, elektronik, *online*) sementara itu secara *internal* menggunakan media cetak berupa majalah yang diterbitkan secara berkala dan media *online* atau *Website* sebagai sarana untuk menginformasikan seluruh informasi baik aspek kebijakan, peraturan-peraturan, maupun agenda-agenda program Kementerian Agama.
- c. Model komunikasi yang terjadi dalam konteks *media realtions* antara Humas Kanwil Kemenag Sulsel dengan media massa lokal, mencakup tiga aspek yaitu, *Public Information*, *Two-way Asymmetric* dan *Two-way Symmetric*.

2. Faktor pendukung dan penghambat *media relations* Humas Kanwil Kemenag Sulsel dalam publikasi informasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016, yaitu:

- a. **Secara *internal***, faktor pendukung yaitu keberadaan media internal Kementerian Agama seperti majalah dan *website*, dalam hal ini *website* Kementerian Agama RI. terintegrasi dengan seluruh *website* Kanwil Kemenag di setiap provinsi sehingga mendukung proses koordinasi, faktor penghambat yaitu Humas Kanwil Kemenag Sulsel tidak hanya memfasilitasi unit kerjanya melainkan juga turut memfasilitasi Humas Kemenag Kabupaten/Kota dan beberapa program kegiatan kehumasan yang memiliki kaitan dengan hubungan antar lembaga dan juga media lokal.
- b. **Secara *eksternal***, faktor pendukung yaitu dapat menjalin relasi terbuka dengan media sehingga jika ada permasalahan baik secara lembaga maupun person maka akan dapat diatasi karena relasinya saling terbuka, faktor penghambat yaitu persoalan anggaran, dimana biaya periklanan di media massa membutuhkan biaya yang relatif besar, selain itu penghambat juga dilihat dalam perspektif relasi dengan publik, dimana media internal majalah dan *website* yang dimiliki Humas Kanwil Kemenag Sulsel dianggap kurang dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh pelosok daerah terutama yang hendak mengakses informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

B. *Implikasi Penelitian*

Dengan selesainya skripsi ini maka penulis

1. Menganalisa Humas Kanwil Kemenag Sulsel, maka perlu ditumbuh kembangkan keberadaan Humas disetiap Kabupaten/Kota sehingga penyebaran informasi dapat dijangkau masyarakat setiap Kabupaten/Kota.

2. Menghimbau kepada pengurus Kanwil Kemeneag Sulawesi Selatan, Pemerintah Sulawesi Selatan serta tokoh-tokoh masyarakat agar kiranya tetap mempertahankan pencapaian dalam penyelenggaraan Ibadah Haji sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Andalusi, Al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Anggoro, M Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001.
- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatam Media. 2007.
- Darmastuti, Rini. *Media Relations- Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2012.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- _____. *Human Relations dan Public Relations*. Jakarta: Mandar Maju, 1993.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers, 2011.
- Jefkins, Frank. *Public Relations Edisi ke -5*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002
- Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2014
- Kusumastuti, Frida. *Dasar – Dasar Hubungan Masyarakat*. Bogor Selatan: PT. Ghalia Indonesia. 2002.
- Mangkuto, Djufri M. *Panduan Praktis Manasik Haji Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*. Jakarta: Sinar GrafikaOffset. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nawawi, Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh, Kajian Masalah Aqidah dan Ibadat*. Jakarta: Paramadina, 2002
- Nurudin. *Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: al-Fath lil A'lam al-Arabi, 2004
- Sastrosuebrotto, Ika. *Public Relations Tales*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). 2013.
- Widjaja, H.A.W. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*

_____. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang*

_____. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

_____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*

_____. *Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*

Situs Kelompok Organisasi atau Lembaga

<https://sulsel.kemenag.go.id/artikel/12047/sejarah-kementerian-agama-prov-sul-sel>

Skripsi

Dedy Riyadin Saputro. *Aktivitas Humas Dalam Menjalankan Media Relations (Studi Deskriptif pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Yogyakarta)*. Yogyakarta: Ilmu Komunikasi. UIN Sunan Kalijaga.

E. Novianti Atik Kurniawati. *Aktivitas Media Relations pada Perum Pegadaian Kanda VII Yogyakarta*. Yogyakarta: Ilmu Komunikasi. Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAN JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 021-3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 34833028
<http://kemenag.go.id> email: sekjen@kemenag.go.id

Jakarta, 24 Juli 2013

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4044 /2013

TENTANG

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
SUBBAGIAN INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, serta peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, kami mohon agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menugaskan Kepala Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat untuk:

1. Melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan, dan capaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, termasuk di dalamnya:
 - a. mengelola majalah Kantor Wilayah dan penerbitan berkala lainnya;
 - b. menyelenggarakan konferensi pers, temu wicara dengan insan media dan membuat siaran pers (*pers release*) serta mengirimkannya kepada redaksi media massa lokal maupun nasional;
 - c. mengelola dokumentasi dalam bentuk foto, video, audio maupun lainnya;
 - d. melakukan pemantauan dan analisis terhadap pemberitaan terkait Kementerian Agama, termasuk pembuatan klipring berita;
 - e. menjadi penghubung dengan media dan menjadi juru bicara Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - f. mengelola publikasi media dalam ruang seperti *standing banner* dan media luar ruang seperti baliho, spanduk, lainnya.
2. Memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat, termasuk di dalamnya:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lintas bidang/unit kerja di tingkat provinsi;
 - b. mengelola unit pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID Unit Kantor Wilayah);
 - c. mengelola pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Agensi/Sub Agensi LPSE);
 - d. membantu pelaporan pelaksanaan anggaran secara elektronik (e-MPA);
 - e. menyiapkan rohaniwan yang diperlukan oleh instansi lain untuk keperluan pengambilan sumpah jabatan;

3. Mengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Kantor Wilayah meliputi: *website* Kantor Wilayah, jaringan VPN-IP (*Virtual Private Network - Internet Protocol*), LAN (*Local Area Network*), telepon berbasis internet, *video conference*, layanan e-mail resmi Kementerian Agama, serta layanan lainnya yang berbasis TIK.
4. Menjadi penghubung Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan instansi/lembaga lain terutama dengan DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta dengan instansi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan Kementerian Agama di tingkat Provinsi.
5. Memberi bimbingan teknis tentang kehumasan, data dan TIK kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri pada bidang kehumasan, data, dan TIK.
7. Melakukan koordinasi/konsultasi tentang kebijakan, program dan kegiatan kehumasan, data, dan TIK kepada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya yang terkait di Kementerian Agama Pusat.

Selain itu, demi tercapainya kinerja Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat yang optimal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar melakukan pengawasan, memberi bimbingan, serta memberi dukungan, khususnya dalam kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memadai.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Bahrul Hayat, Ph. D.

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama, Jakarta

Tabel 6.5. Alokasi Kuota Jamaah Haji Tahun 2010-2016
Prov. Sulawesi Selatan

No	Kabupaten / Kota	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Makassar	1132	1132	1132	1132	904	904	941
2	Kab. Maros	310	310	310	310	248	248	244
3	Kab. Pangkep	301	301	301	301	240	240	243
4	Kab. Barru	170	170	170	170	136	136	140
5	Kota Pare - pare	121	121	121	121	97	97	98
6	Kab. Pinrang	356	356	356	356	285	285	284
7	Kab. Sidrap	251	251	251	251	202	202	211
8	Kab. Tana Toraja	35	35	35	35	28	28	28
9	Kab. Enrekang	186	186	186	186	149	149	150
10	Kab. Soppeng	249	249	249	249	198	198	202
11	Kab. Wajo	403	403	403	403	322	322	324
12	Kab. Luwu	271	271	271	271	216	216	216
13	Kota Palopo	108	108	108	108	86	86	85
14	Kab. Luwu Timur	155	155	155	155	122	122	125
15	Kab. Luwu Utara	228	228	228	228	181	181	181
16	Kab. Bone	745	745	745	745	592	592	595
17	Kab. Sinjai	232	232	232	232	184	184	186
18	Kab. Selayar	114	114	114	114	89	89	89
19	Kab. Bulukumba	405	405	405	405	323	323	326
20	Kab. Bantaeng	183	183	183	183	147	147	150
21	Kab. Jeneponto	341	341	341	341	272	272	274
22	Kab. Takalar	261	261	261	261	209	209	207
23	Kab. Gowa	599	599	599	599	477	477	486
TOTAL		7156	7156	7156	7156	5707	5707	5785

(Sumber data : Siskohat 2016)



(Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Husain, selaku Kepala Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat)



(Wawancara dengan Bapak Mawardi, selaku Bagian Pers dan Berita)



(Wawancara dengan Bapak Dr. H. Kaswad Sartono, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah)



(Wawancara dengan Muh. Fahrullah, selaku Reporter Media Cetak dan *Online* Rakyat Sulsel)



(Teman-teman Media Elektronik TVRI)



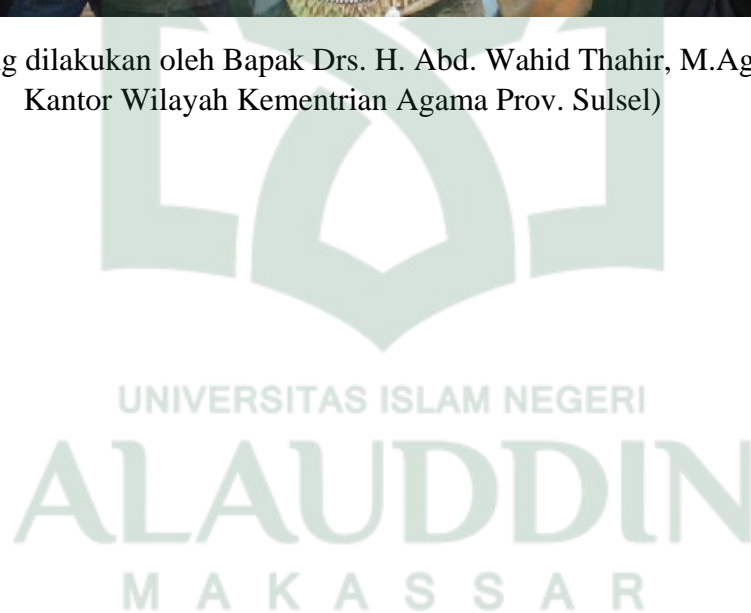
(Pengarahan kepada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) oleh Bapak Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S. selaku Wakil Gubernur Sulsel)



(Press release yang dikirim oleh Mawardy Siradj selaku Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sulsel melalui aplikasi sosial media Whats App)



(Konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “*Media Relations* Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016” bernama Ahmad Ridha Akhzannur, Lahir pada tanggal 26 Maret 1996, di Makassar Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Drs. Ardiansyah Sanusi dan Dra. Hj. Sariwati.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD. Inpres Antang II Makassar pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP. Muhammadiyah 1 Makassar dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN. 10 Makassar dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di UIN Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R